



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023, agar Perangkat Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Perencanaan Strategis ini memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dijalankan selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang, kelemahan dan kendala yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 ini dilakukan sebagai upaya rasionalisasi terhadap target – target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) bidang perpustakaan Tahun 2025-2029 yang meningkat serta penyesuaian indikator dengan Nasional. Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 ini sangat penting sebagai upaya memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait khususnya Bappeda Provinsi Sumsel.

Dengan telah disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam mewujudkan pencapaian tujuan yang diemban lembaga guna menunjang keberhasilan program pemerintah khususnya dalam mencerdaskan masyarakat. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi, memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

KEPALA,



Fitriana, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 196903281989082002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusun.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
 II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
2.1 Gambaran Pelayan Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	41
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	51
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	55
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	62
2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan	62
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD	63
2.1.7 Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab PD	63
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	63
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	63
2.2.2 Isu Strategis	65
 III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 77
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah	77
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah	79
3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK)	80
4. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	86
5. Strategi Rencana Strategis (Renstra) dan Arah Kebijakan	90
6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	92
 IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA BIDANG....	 96
1. Uraian Program.....	96
2. Uraian Kegiatan	97
3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator,Target	98
4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas	138
5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	139
6. Target kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	140
 V. Penutup.....	 142

DAFTAR TABEL

Tabel	hal
1.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.....	2
2.1. Rekapitulasi Pengunjung Perpustakaan Jan-Des 2024.....	18
2.2. Pengunjung Perpustakaan Provinsi Tahun 2020-2024	19
2.3. Anggota Perpustakaan, Buku Beredar dan Buku Kembali	20
2.4. Data Koleksi Umum dan Referensi Tahun 2022 s.d 2024.....	22
2.5. Koleksi Deposit Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2024	24
2.6. Koleksi KCKR Terbitan Dinas Perpustakaan Th 2018-2024	25
2.7. Rekapitulasi Perawatan Bahan Pustaka Tahun 2020-2024	26
2.8. Tenaga Perpustakaan Dinas Perpustakaan 2017 s.d 2024	28
2.9. Rekapitulasi Peserta Bimbingan Teknis 2020-2024.....	30
2.10. Data Magang di Perpustakaan Tahun 2015 – 2024	31
2.11. Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumsel Tahun 2017-2024	32
2.12. Rekapitulasi Perpustakaan Yg Telah Dibina Tahun 2017-2024 ..	33
2.13. Data Perpustakaan ber SNP dan Non SNP Tahun 2024.....	34
2.14. Perpustakaan Terakreditasi Tahun 2012-2024	36
2.15. Data Perpustakaan Desa/Kelurahan Penerima Bantuan.....	37
2.16. Capaian Atas Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020 sd 2024 ...	40
2.17. Gambaran Kepegawaian Dinas Perpustakaan Tahun 2024	54
2.18. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 sd 2024	55
2.19. Hasil Pengukuran Nilai Indek Kepuasan Masyarakat 2024	56
2.20. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perpustakaan 2024.....	60
2.21. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan PD	61
2.22. Permasalahan dan Faktor Yang Mempengaruhi	69
2.23. Teknik penyimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah	75

DAFTAR TABEL

Lampiran	hal
3.1. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Pemerintah	78
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan Prov Sumsel	87
3.3. Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan Prov Sumsel.....	91
3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra.....	92
4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan	99
4.2. Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan	114
4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program	138
4.4. Indikator Kinerja Utama PD	140
4.5. Indikator Kinerja Kunci PD	141

DAFTAR GAMBAR

Lampiran	hal
4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	141

DAFTAR GRAFIK

Grafik	hal
1. Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020-2024	19
2. Pengunjung Perpustakaan Tahun 2024	20
3. Data Anggota Perpustakaan, Koleksi Yang Dipinjam.....	21
4. Koleksi Perpustakaan Provinsi Sumsel.....	23
5. Koleksi Deposit	25
6. Koleksi KCKR.....	25
7. Perawatan Bahan Pustaka	26
8. Data Tenaga Perpustakaan Se-Sumsel.....	29
9. Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan	30
10. Peserta Magang.....	31
11. Data Perpustakaan Provinsi Sumsel	32
12. Data Perpustakaan Ber SNP dan Non NSP.....	35
13. Perpustakaan terbina sesuai SNP	37
14. Target dan Capaian TGM Tingkat Provinsi Sumsel.....	38
15. Target dan Capaian IPLM.....	39
16. IPLM Per Provinsi.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, yang berfungsi diantaranya adalah menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan serta memajukan kebudayaan nasional melalui pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Saat ini peran, fungsi dan kewenangan perpustakaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Urusan Perpustakaan merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan dengan telah diaturnya secara jelas hak, kewajiban dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan. Kewenangan Urusan Perpustakaan di Tingkat Provinsi meliputi urusan Pembinaan Perpustakaan mencakup Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno mencakup Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi, Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah, Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi serta Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Berikut pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana tertera pada table 1.1. di bawah ini

Tabel 1.1
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional c. Pembudayaan Kegemaran Membaca tingkat nasional	a. Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah provinsi b. Pembudayaan kegemaran membaca tingkat daerah provinsi	a. Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota b. Pembudayaan kegemaran membaca tingkat daerah kabupaten/kota
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi nasional b. Penerbitan katalog induk nasional dan bibliografi nasional c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah kuno dari luar d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Pusat.	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam, koleksi daerah di daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
3.	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan		

Perpustakaan Provinsi Sumsel merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Provinsi yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan mempunyai fungsi yang sangat strategis terkait dengan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perpustakaan,

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 harus dilakukan secara bersamaan dengan Penyusunan Rencana Strategis dan sebagian substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPJMD Provinsi. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Daerah. Untuk itu diperlukan kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terutama menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan.

Mengingat Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan penyelelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 sebagai upaya untuk mendukung 8 (delapan) Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebaliknya Pemerintah Daerah melalui RPJMD menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan dijaga pencapaiannya melalui RKPD.

Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel sebagai salah satu unit kerja yang menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di bidang Perpustakaan diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel untuk kemudian disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang memuat tentang tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang terukur dan menjadi tolok ukur atau indikator pencapaian pembangunan di

bidang Perpustakaan dan berfungsi sebagai arah/pedoman pengembangan perpustakaan.

Rencana Strategis juga dijadikan sebagai dasar dalam menyusun strategi, program dan kegiatan serta rencana tindak yang memberikan gambaran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan bidang Perpustakaan.

Proses penyusunan Rencana Strategis melibatkan pemangku kepentingan diantaranya Bappeda Prov. Sumsel, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, BUMD/BUMN, Pendidik, Pegiat Literasi, Penulis, Komunitas dan para penerbit dalam sebuah forum perangkat daerah/lintas perangkat yakni Rapat Teknis Bidang Perpustakaan dengan harapan agar program, kegiatan, sub kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis dapat dilakukan secara komprehensif, terpadu, sinergitas harmonisasi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta penguatan kelembagaan perpustakaan di daerah.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel juga memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disamping isu-isu strategis yang perlu dikedepankan untuk dicari solusi atas akar permasalahannya.

Selanjutnya Rencana Strategis Daerah juga harus memiliki keterkaitan yang erat dengan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional periode 2025-2029 terutama di dalam pencapaian target-target sasaran Pemerintah Pusat di bidang Perpustakaan di dalam pencapaian :

1. Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas melalui Program Penguatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas
2. Prioritas Nasional 8 yaitu memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur melalui Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa.

Keterkaitan Rencana Strategis Perpustakaan Provinsi dengan Rencana Strategis Perpustakaan kabupaten/kota tergambar dari sinkronisasi dan harmonisasi program kerja yang memerlukan campur tangan provinsi di dalam percepatan pencapaian target melalui sharing anggaran sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Provinsi dari Tahun 2025-2029.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih periode masa jabatan 2025-2029, **Bapak H. HERMAN DERU dan Bapak H. CIK UJANG**, yang dilantik oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara. Visi yang diusung saat ini adalah ***"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua."***

Guna mewujudkan visi tersebut maka perlu dijabarkan ke dalam misi yang menaungi urusan perpustakaan yaitu misi ke-1 *"Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing guna mewujudkan Sasaran ke-1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia, dengan Program Strategis melanjutkan*

Di sisi lain, Perpustakaan Provinsi juga mendukung pencapaian misi ke-7 *Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal guna mewujudkan sasaran ke 20 yaitu meningkatnya pembangunan kebudayaan melalui Program Strategis Sumsel religious, toleransi dan berbudaya.*

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053);
8. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265);
9. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang memuat Asta Cita
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029 adalah :

1.3.1 Maksud

- a. Sebagai acuan dan arah yang jelas baik di tingkat instansi maupun daerah mengenai tujuan yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan serta pedoman dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahunan.

- b. Sebagai upaya untuk menyelaraskan RPJMD 2025-2029 dengan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel 2025-2029
- c. Menghasilkan rumusan strategis, arah kebijakan, program yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan memperhatikan arahan dan pedoman di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel secara terperinci untuk dapat dilaksanakan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian target target RPJMD bidang Perpustakaan.
- b. Menggambarkan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk kebermanfaatan bagi Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedure dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan baik oleh Kementerian K/L, Pemerintah Daerah dalam penetapan target target sasaran dalam RPJMD
- c. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi sinergi dan sinkronisasi antara Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dengan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota

1.4 Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) dalam laporan ini terdiri dari 8 (delapan) bab yang terdiri atas :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum latar belakang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang menggambarkan kondisi yang mendasari disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan regulasi dan nilai strategis serta maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat data data dan informasi terkait dengan pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang disertai dengan hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan urusan perpustakaan 5 (lima) tahun terakhir, serta menggambarkan evaluasi atas capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terutama berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator IKK serta memuat dilengkapi dengan data atau tabel. Selain itu juga bab ini juga menyajikan informasi terkait tugas pokok fungsi, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan, mitra dan kerjasama Perangkat Daerah. Bab ini juga menyajikan permasalahan dan mengidentifikasi isu isu strategis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta memuat kondisi Perangkat Daerah saat ini, strategi dan arah kebijakan

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang merupakan hasil casecading dari tujuan, sasaran, outcome dan output mengacu pada nomenklatur serta target kinerja dan keberhasilan.

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan perpustakaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel di dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan dituntut untuk memberikan kualitas layanan yang memadai kepada pemustaka dengan mengedepankan kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu di dalam menjalankan tugas pokok fungsinya perpustakaan provinsi menyediakan berbagai jenis layanan perpustakaan untuk melayani masyarakat baik yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan di dalam gedung maupun di luar gedung. Secara umum jenis layanan perpustakaan diantaranya terdiri dari layanan pemanfaatan sumber sumber informasi perpustakaan, layanan penyediaan bahan pustaka, layanan informasi, layanan pemanfaatan sarana prasarana perpustakaan, layanan pembinaan terhadap berbagai jenis perpustakaan serta layanan pelestarian bahan pustaka.

Ditinjau dari jenis layanan/diversifikasi layanan yang disediakan oleh Perpustakaan Provinsi meliputi :

1. Layanan Teknologi Informasi (*IT Service*)

Perpustakaan Sumatera Selatan saat ini telah sepenuhnya menerapkan TIK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*web-based public library service*). Beberapa kegiatan teknis pelayanan kepada masyarakat yang dapat dilakukan adalah

- a. Pendaftaran anggota (*Membership*).
- b. Penelusuran informasi koleksi (*Realtime Bibliographic Searching*).
- c. Pemesanan koleksi (*Book Reservation*).
- d. Cek status pinjaman (*Loan Selfcheck*).
- e. Perpanjangan pinjaman koleksi (*Loan Period Extension*).
- f. Pembaharuan data anggota (*Status Update*).
- g. Unggah foto (*Photo Upload*).
- h. Ubah kata sandi (*Change Password*).
- i. Kiriman pesan (*Messaging*).
- j. Interaksi sesama anggota (*Social Networking*).
- k. Peminjaman buku secara mandiri.

- l. Penelusuran informasi koleksi secara mandiri.
- m. Pengembalian buku tanpa adanya petugas perpustakaan.
- n. Inventarisir bahan pustaka secara mudah dan cepat oleh pemustaka.
- o. Diary Sumsel.
- p. KPOP (Pembuatan Kartu Anggota Secara Online)

2. Layanan Administrasi Anggota (*Membership Service*)

Layanan Administrasi dibuka mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat) dengan sistem komputerisasi online sebagaimana gambaran aktivitas layanan di bawah ini :



3. Sirkulasi Bahan Pustaka (*Circulation*)

Sirkulasi sepenuhnya telah didukung oleh sarana komputer dengan aplikasi perpustakaan berbasis Inlislite yang terus dikembangkan untuk memudahkan layanan kepada pemustaka.



4. Layanan Rujukan (*Reference Service*)

Bagi pengunjung yang memerlukan buku rujukan disediakan Ruang kerja termasuk hari libur. Terdapat lebih dari 28.576 judul, 83.330 buku referensi, majalah ilmiah.

dan TV LED 52 Inc dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk hiburan karaoke bagi pengunjung.



7. Layanan Tempat Pertemuan (Meeting & Discussion Service)

Ruang diskusi disediakan untuk pengunjung yang datang untuk berdiskusi kelompok, ruang ini luasnya 8 x 10 m² dan mempunyai daya tampung sampai dengan 30 orang. Fasilitas ruangan terdiri dari microphone portable, proyektor dan layar.



8. Layanan Akses Internet (Internet Access)

Perpustakaan Dinas Provinsi Sumsel menyediakan 24 unit PC dan area hotspot 24 jam yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang berkunjung.





9. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan perpustakaan keliling menjangkau hampir seluruh golongan masyarakat baik sekolah, masyarakat umum, panti-panti asuhan, pondok pasantren, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak, Universitas, Monumen Perjuangan Rakyat, Pocadi Sungai Ijuk, Stadion Kamboja, Situs Purbakala, Taman Purbaka, OPD dan asrama haji. Kendaraan Layanan Keliling yang tersedia 4 Unit. Sampai dengan Tahun 2024 frekwensi layanan keliling sudah mencapai 428 kali dan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan keliling cukup tinggi.



10. Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial



Pembuatan Kue



Salon



Pelatihan Komputer

Perpustakaan sebagai tempat berkegiatan masyarakat, mengedukasi masyarakat dalam mengembangkan wawasan

pengetahuan dan berbagai keterampilan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan sangat berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik. Keberadaan perpustakaan berbasis inklusi social tersebar di 98 desa/kelurahan. Beberapa contoh di atas merupakan kegiatan pelibatan masyarakat di Perpustakaan Desa yang ada di Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin dan Kab. OKI.

11. Layanan Pemanfaatan Koleksi Deposit (*Deposit Collection Service*)

Ruangan ini luasnya 80 m² dengan koleksi berupa terbitan umum dan kontens lokal.



12. Layanan Koleksi Baca Anak

Ruang baca anak menempati ruang terpisah didekat gerbang utama dengan luas ruangan 36 m² dan koleksi buku-buku bacaan anak berjumlah lebih kurang 7.730 judul, 20.993 eksemplar. Ruang baca anak juga dilengkapi dengan sarana permainan anak seperti rumah-rumahan, papan perosotan, mandi bola, dan 4 unit komputer kids yang diperoleh dari bantuan *Coca Cola Foundation*. Berbagai fasilitas tersebut bertujuan menumbuhkembangkan minat baca anak sejak usia dini.

13. Layanan Pojok Baca Publik Konvensional dan Pojok Baca Digital

Layanan pojok baca merupakan upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi dalam rangka memperluas ketersediaan sarana akses informasi di masyarakat dan area publik serta pendampingan kepada masyarakat dalam memberikan pelatihan keterampilan dan memaksimalkan penggunaan perangkat komputer dan teknologi informasi dalam bentuk pemberian pelatihan seperti keberadaan pojok baca di sungai ijuk

keramasan, pojok baca di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan pojok baca di LRT.

SUNGAI LJUK



POJOK BACA



POJOK BACA BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



Pojok Baca LRT



14. Layanan Pembuatan Kartu Anggota Online (KPOP)

Merupakan Inovasi terbaru di bidang perpustakaan. Layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat untuk menjadi anggota perpustakaan tanpa harus mendatangi perpustakaan. Dua ribu lima ratus Masyarakat Umum yang menjadi target Layanan Perpustakaan Go Digital, Akses Perpustakaan Dimanapun Anda Berada. Download Aplikasi Melalui Layanan *Play Store*

15. Layanan Pengembangan Informasi Berbasis Digital melalui Buku Bacaan Elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Gadget dengan ketersediaan 4,415 Judul judul, 7.977 copy, serta mempermudah masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang tersedia di Diary Sumsel dalam bentuk e-book.

16. Layanan Perpustakaan Digital

Layanan perpustakaan digital merupakan layanan perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana prasarana perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi. Umumnya layanan perpustakaan digital di lokuskan pada ruang ruang public, Beberapa lokus keberadaan perpustakaan digital Provinsi Sumsel di Kec. Kertapati Sungai Ijuk Kota Palembang dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Kab. Banyuasin di Jl. Merdeka Simpang Polres Kab. Banyuasin, Kab. OKU di Kantor Sekretariat TP PKK Kab. OKU, Kab. Empat Lawang di Dekranasda Kab. OKI di Gedung Pramuka, Kab. Musi Rawas di Alun - Alun Taman Beregam, Kota Lubuk Linggau di KODIM, Kab Lahat di Kantor Lurah Bandar Jaya, Kab Muba di Desa Sidorejo Kec. Keluang, Kota Palembang di DPMPTSP Jakabaring, Kota Pagar Alam di Gedung Juang, Kab. Muratara di DesaKec. Rupit dan Kab. Pali.

17. Layanan Peminjaman Ruang Diskusi dan Bioskop Mini

Layanan peminjaman ruang diskusi disediakan untuk berbagai jenis masyarakat yang menggunakannya, Umumnya ruang diskusi dimanfaatkan oleh mahasiswa dan pegiat literasi/komunitas. Pemanfaatan ruang diskusi lapisan dapat dilakukan oleh masyarakat, Ruang Diskusi yang tersedia berukuran $4m \times 8m = 32m^2$, sementara ruang bioskop mini dapat dimanfaatkan oleh anak anak TK dan SD untuk menonton film edukasi dalam rangka menumbuhkan minat baca sejak usia dini.

18. Layanan Internet

Layanan Internet adalah adalah Layanan yang disediakan oleh Perpustakaan Provinsi untuk para pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Layanan Internet yang disediakan adalah free bertujuan mempermudah pemustaka untuk mengakses informasi yang di sediakan oleh Perpustakaan Provinsi.

19. Layanan bimbingan pemakai (literasi informasi)

Disediakan untuk membimbing pemustaka baru dalam menggunakan seluruh fasilitas, sumber informasi, mengetahui peraturan dan tata terbit yang ada di perpustakaan.

Dukungan berbagai jenis diversifikasi layanan tersebut di atas yang tersedia di Perpustakaan Provinsi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka kita dapat menggolongkan pengunjung/pemustaka ke dalam pengunjung layanan sirkulasi, layanan keliling, layanan anak-anak, layanan referensi, layanan internet, layanan pojok baca, layanan deposit serta layanan online. Di samping itu data pengunjung perlu juga didukung oleh data pilah gender Berikut gambaran pegunjung perpustakaan pada berbagai jenis layanan Tahun 2024, juga digambarkan kondisi pengunjung di Tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pengunjung Perpustakaan
Bulan Januari s.d Desember 2024

No	Bulan	Layanan Sirkulasi	Layanan Keliling	Layanan Pocadi	Layana s Anak	Layanan Deposit	Layanan Referensi	Layanan Online	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	Januari	1.688	25.947	3.209	154	139	113	2.120	33.370
2	Februari	1.381	23.459	2.981	297	51	101	2.077	30.347
3	Maret	1.170	21.872	2.902	197	124	102	2.081	28.448
4	April	821	11.322	2.946	106	99	91	1.598	16.983
5	Mei	1.833	16.230	3.041	536	51	103	4.552	26.346
6	Juni	1.269	4.360	3.748	171	98	115	4.731	14.492
7	Juli	1.381	22.966	3.998	121	136	108	4.506	33.216
8	Agustus	1.188	28.816	4.086	261	136	92	4.495	39.074
9	September	1.462	20.004	4.075	179	94	88	4.524	30.426
10	Oktober	1.689	41.730	4.379	316	96	94	4.589	52.893
11	November	1.807	33.394	4.480	154	136	96	4.651	44.718
12	Desember	1.094	43.532	4.733	127	132	37	4.658	54.313
Total		16.783	293.632	44.578	2.599	1292	1.140	44.582	404.626

Data di atas menjelaskan bahwa akumulasi pengunjung Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2024 mencapai 404.626 dengan laki laki 173.018, Perempuan 231.608 orang mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 351.158 dimana laki laki 145.046, perempuan 206.112 orang atau meningkat sejumlah 53.468 orang. Pengunjung Perpustakaan terdiri atas pengunjung Layanan Sirkulasi 16.783 orang, Layanan Pocadi 44.578 orang, Layanan Keliling 293.632 orang, Layanan Anak 2.599 orang, Layanan Deposit 1.292 orang, Layanan Referensi 1.140 orang dan Layanan online 44.582 orang.

Sementara Pengunjung Perpustakaan untuk Tahun 2022, Tahun 2021 dan Tahun 2000 berturut turut mencapai 187.757 orang dimana Laki Laki 86.641 orang, Perempuan 101.116 orang, 53.740 orang terdiri dari Laki Laki 24.139, Perempuan 29.601 orang dan 23.743 orang. Selama Tahun 2024, jenis layanan perpustakaan bertambah dengan disediakannya layanan Pojok Baca Digital Publik pada Instansi Vertikal Pelayanan Publik pada beberapa titik lokus. Berikut table dan grafik jumlah pengunjung perpustakaan provinsi selama 5 (lima) tahun mulai berturut turut di mulai sejak Tahun 2000 s.d 2024 berdasarkan gender sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pengunjung Perpustakaan Provinsi Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenis Data	Tahun Ke									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Pengunjung Perpustakaan	10.722	13.021	24.139	29.601	86.641	101.116	145.046	206.112	173.018	231.608
TOTAL		23.743		53.740		187.757		351.158		404.626	

Sumber Bidang Layanan dan Otomasi

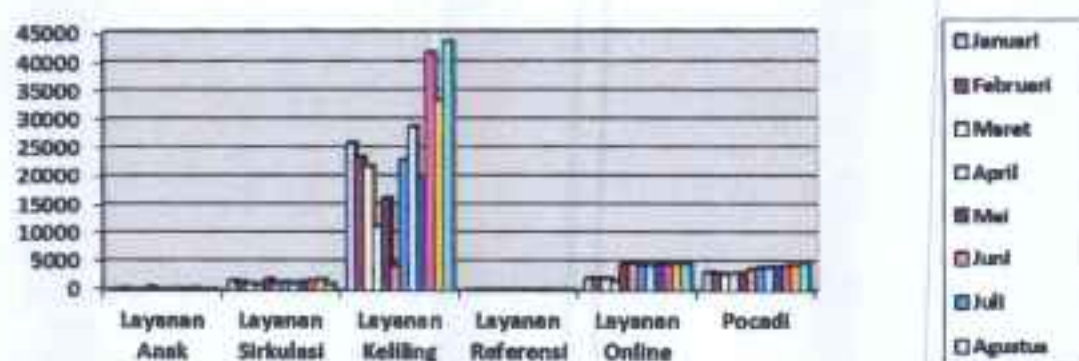
Tabel 2.1 dan 2.2 di atas menjelaskan bahwa Pengunjung Perpustakaan Provinsi Sumsel di Tahun 2020 s.d 2022 sangat minim jumlahnya dan mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan di Tahun 2024. Penurunan jumlah pengunjung selama tiga tahun terakhir akibat dari dampak covid 19, dimana seluruh pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat dibatasi jumlahnya, begitu juga jam buka layanan perpustakaan. Penurunan jumlah pengunjung hampir mencapai 75% dan kembali mengalami peningkatan secara bertahap sejak Tahun 2023. Secara grafik tabel diatas tergambar sebagai berikut :



Grafik 1 : Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020 s.d 2024

Dari tujuh jenis layanan yang ditawarkan, Layanan Keliling merupakan layanan yang dominan dimanfaatkan oleh pemustaka,

baik yang dilayankan di gedung Perpustakaan Provinsi maupun di luar gedung dalam rangka memperluas akses layanan perpustakaan di area-area publik seperti pendirian pojok baca digital di perkampungan masyarakat kertapati, bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, OPI Mall, Monpera dan Taman Rekreasi Bukit Siguntang serta layanan sarana operasional Perpustakaan Keliling yang melayani hampir seluruh yayasan yatim piatu, lapas, sekolah, komunitas serta masyarakat yang berada di daerah perbatasan Kab. OKI, Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin. Di tahun 2024 Layanan Keliling menempati urutan pertama yang dimanfaatkan oleh pemustaka, disusul oleh Layanan Online di urutan kedua, dan di urutan ketiga adalah Layanan Pocadi. Namun titik layan masih sangat terbatas jumlahnya dan perlu diperluas ke ruang ruang publik lainnya.



Grafik 2. Pengunjung Perpustakaan Tahun 2024

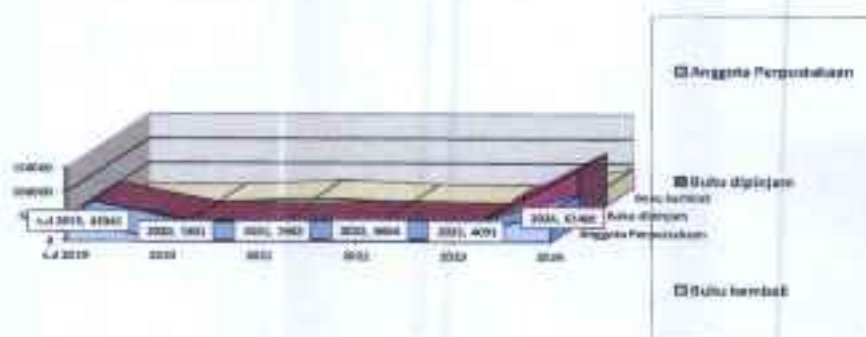
Terkait dengan jumlah anggota perpustakaan, tersedia inovasi layanan pembuatan kartu anggota perpustakaan secara online (KPOP) juga buku kembali, buku yang dipinjam, dan buku yang beredar dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat diinformasi pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Anggota Perpustakaan, Buku Beredar dan Buku Kembali
Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anggota Perpustakaan	43.341	1.801	2.962 L. 1.530 P. 1.432	6.664 L. 3252 P. 3.412	4.098 L 1.966 P. 2132	2.547 L 1.118 P 1.429	61.406
2	Buku Beredar	-	-	19.683	30.973	29.026	28.524	108.206
3	Buku Kembali	5.320	6.263	14.082	6.337	4.056	3.404	39.462
4	Buku Dipinjam	45.812	6.745	5.839	7.565	5.022	3.703	74.686

Tabel 2.3 di atas mengemukakan bahwa data jumlah anggota Perpustakaan Provinsi Sumsel sampai dengan Tahun 2024 mencapai 61.406 orang di uraikan berdasarkan gender setiap tahunnya, mengalami peningkatan dari 5 (lima) tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan inovasi Layanan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan secara online (KPOP) yang dapat diakses dari manapun. Selanjutnya untuk buku yang dipinjam s.d Tahun 2024 berjumlah 74.686 eksemplar mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 mencapai 70.983 eksemplar atau meningkat sejumlah 3.703 eksemplar. Hal dikarenakan masyarakat lebih banyak memanfaatkan koleksi e book secara digital.

Kemudian untuk buku kembali s.d Tahun 2024 mencapai 39.462 eksemplar, mengalami peningkatan di bandingkan Tahun 2023 sejumlah 36.058 eksemplar atau meningkat 3.404 eksemplar. Secara umum gambaran tentang anggota perpustakaan, buku yang dipinjam dan buku yang kembali dapat dilihat pada grafik 3 di bawah ini :



Grafik 3. Data Anggota Perpustakaan, Koleksi Yang Dipinjam dan Dikembalikan

Peningkatan jumlah pemustaka juga sangat dipengaruhi oleh berbagai inovasi serta kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana perpustakaan yang mudah di akses masyarakat baik secara online maupun ditempat. Di samping itu keberadaan pojok-pojok baca di ruang-ruang publik seperti di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Sungai Ijuk Kertapati, Objek Wisata Monpera, LRT Bumi Sriwijaya, Kantor Pelayanan Publik seperti Kantor Imigrasi, Polda serta pojok baca desa/kelurahan dimana peran Perpustakaan sebagai pusat berkegiatan masyarakat. Seiring dengan beragamnya diversifikasi layanan Perpustakaan

berbasis teknologi informasi (Teknologi Informasi Service) beberapa diantaranya dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Fungsi lainnya adalah peran perpustakaan provinsi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai informasi dan pengetahuan, Pengembangan koleksi dalam rangka meningkatkan keberagaman judul/ jumlah hampir setiap tahunnya dilakukan dan merupakan proses awal dalam mengisi perpustakaan dengan sumber-sumber informasi yang bermutu dan menjadi daya tarik pemustaka disesuaikan dengan pemenuhan selera dan kebutuhan informasi para pemustaka. Di samping itu tujuan juga untuk meningkatkan ketersediaan bahan bacaan bermutu secara merata dan memadai untuk masyarakat di Sumatera Selatan.

Pengembangan Bahan Bacaan selain konvensional juga koleksi e - book dapat diakses oleh masyarakat dari manapun dengan memanfaatkan aplikasi Diary Sumsel. Selain itu ketersediaan koleksi juga dijumpai di pojok baca publik yang tersebar di wilayah Kota Palembang. Berikut jumlah koleksi dengan berbagai jenis golongan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel sejak Tahun 2020 s.d 2025 (prakiraan).

Tabel 2.4
Data Koleksi Umum dan Referensi Tahun 2022 s.d. 2024
Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel

No.	Kelas	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Judul	eksemplar	Judul	eksemplar	Judul	eksemplar
1.	000-099	9.372	23.586	9.577	24.137	9.652	24.218
2.	100-199	11.294	49.555	11.523	50.035	11.595	50.171
3.	200-299	39.238	136.805	39.702	137.642	39.959	138.132
4.	300-399	51.190	158.575	51.597	159.916	51.970	160.654
5.	400-499	10.435	31.829	10.876	32.921	10.885	32.937
6.	500-599	11.255	35.466	11.476	36.038	11.569	36.214
7.	600-699	47.042	158.840	47.567	160.085	47.757	160.431
8.	700-799	10.455	32.372	11.026	33.765	11.147	34.000
9.	800-899	24.712	69.293	32.961	90.662	33.294	91.283
10.	900-999	12.385	36.586	12.658	37.194	12.699	37.260
11.	Anak-anak	7.730	20.993	8.012	21.701	6.209	22.095
12.	Referensi	28.562	83.301	28.652	83.482	28.657	83.487
13.	Fiksi	7.634	19.629	7.730	20.968	7.730	20.968
14.	Koleksi Digital	2.693	4.533	2.693	4.533	4.415	7.977
Total		275.302	865.859	286.050	878.519	289.511	899.827

Tabel 2.4 di atas menggambarkan bahwa potensi ketersediaan koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel baik melalui pengadaan, pembelian maupun sumbangan dari masyarakat

dan penerbit terus mengalami peningkatan dimulai sejak Tahun 2022 sampai dengan 2024 dimana jumlah koleksi perpustakaan provinsi mencapai 275.303 judul, 865.859 eksemplar di tahun 2022, meningkat menjadi 286.050 judul, 878.519 eksemplar di tahun 2023 dan terus bertambah hingga tahun 2024 berjumlah 289.511 judul, 899.827 eksemplar. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi mengharuskan sebuah Perpustakaan Provinsi terus melakukan penambahan koleksi konvensional terupdate dan koleksi e-book yang dapat diakses oleh masyarakat dengan konten judul yang menarik. Selama lima tahun pengembangan bahan bacaan untuk sebuah perpustakaan provinsi melalui pengadaan buku masih dirasakan memiliki alokasi anggaran yang cukup minim, juga terkendala dengan keterbatasan judul buku yang tersedia di penerbit baik lokal maupun nasional serta keterbatasan buku anak-anak maupun buku kebutuhan difabel. Berikut grafik perkembangan koleksi selama 3 (tiga) tahun terakhir.



Grafik 4. Koleksi Perpustakaan Provinsi Sumsel.

Koleksi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat adalah koleksi digital yang masih terbatas jumlahnya mencapai 4.415 judul, 7.977 eksemplar. Keanekaragaman koleksi juga dapat dimanfaatkan oleh pemustaka melalui ketersediaan Koleksi Deposit yaitu kumpulan dari semua karya cetak karya rekam yang diserahkan oleh penerbit dan pengusaha rekam kepada Perpustakaan Provinsi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam yang ditindaklanjuti oleh Instruksi Gubernur Sumsel Nomor 001/INST/Dispustaka/2021 tanggal 18 Maret 2021,

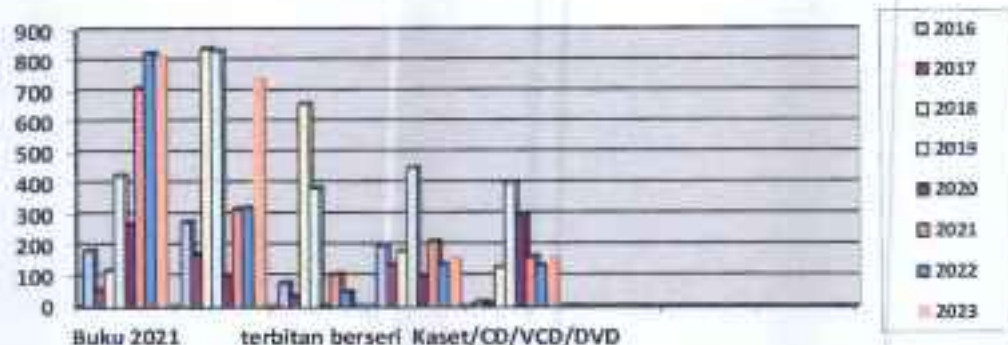
ditujukan kepada kepala daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se Sumsel dan para penerbit untuk melaksanakan kewajibannya menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul kepada Dinas Perpustakaan Provinsi.

Saat ini koleksi deposit telah diperkaya dengan (1) koleksi konten lokal yang dihimpun melalui para penerbit lokal baik Pemerintah maupun Swasta sejumlah 19.775 judul, (2) non buku berupa majalah, surat kabar, buletin, jurnal, brosur sebanyak 261 judul, (3) pustaka kelabu berupa tesis, skripsi, disertasi sebanyak 155 judul, dan (4) kaset CD/DVD/DVD sebanyak 155 judul. Ketersediaan koleksi deposit saat ini mencapai 20.727 judul. Keberadaan koleksi deposit tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Koleksi Deposit Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2024

No	Jenis Koleksi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku Tahun Berjalan	16.765	17.435	18.578	19.775	19.775
2.	Buku	268	700	826	813	381
3.	Non Buku	102	318	322	740	261
	Terbitan berseri majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, brosur, pamphlet, peta, laporan	1	106	49	-	-
4.	Pustaka Kelabu (Tesis/Disertasi/Skripsi)	101	212	138	156	155
5	Kaset CD/VCD/DVD	300	163	135	157	155
Total		16.765	17.435	18.627	19.775	20.727

Dari penyajian data di atas, disampaikan bahwa keberadaan koleksi deposit selama Tahun 2020 s.d 2024 mengalami penambahan, namun tidak begitu signifikan dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam. Kurangnya kesadaran penerbit serta pengalihan penyajian informasi dari tercetak ke digital sebagai sarana untuk mempublikasikan potensi daerah, sangat berdampak kepada jumlah hasil terbitan yang dihimpun. Berikut grafik koleksi deposit yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Provinsi.

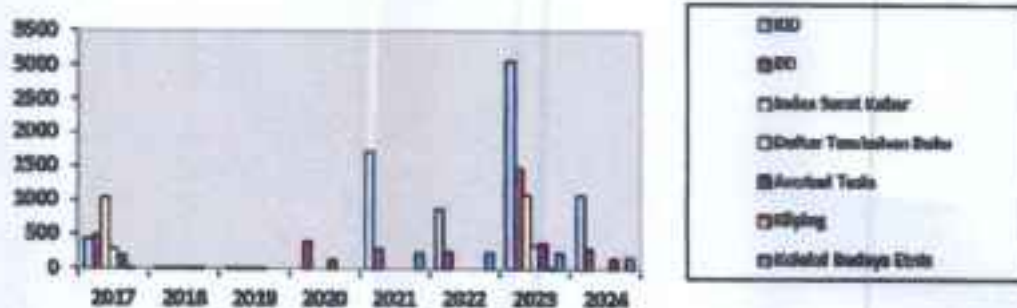


Grafik 5. Koleksi Deposit

Selain koleksi deposit, bahan pustaka juga di per kaya dengan berbagai jenis terbitan Sumatera Selatan mulai dari Katalog Induk Daerah mencapai 1075 judul, Bibliografi Daerah sejumlah 300 judul, Surat Kabar mencapai 1.083 judul, Daftar Tambahan Buku mencapai 332 judul, anotasi tesis 155 judul, kliping 14 judul, jurnal 49 judul dan koleksi budaya etnis nusantara 362 judul. Jenis Terbitan sebagaimana tersebut tidak setiap tahun diterbitkan, hal ini dikarenakan minimnya topik serta minimnya koleksi KCKR yang menjadi terbitan daerah. Gambaran secara rinci terurai pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Koleksi KCKR Terbitan Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumsel Tahun 2018 - 2024

No	Judul Terbitan	Jumlah Terbitan						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Katalog Induk Daerah (KID)	13	20	-	1.722	889	3,081	1075
2	Bibliografi Daerah	14	20	403	310	251	1.496	300
3	Indeks Berita Surat Kabar	13	20				1.083	
4	Daftar Tambahan Buku	14	20				332	
5	Anotasi Tesis	13	20	149			380	155
6	Kliping	13					14	
7	Jurnal	13		36			49	
8	Koleksi Budaya Etnis Nusantara				246		246	362
Total		93	100	588	2.278	1.140	6.681	1.892



Grafik 6. Koleksi KCKR

Layanan koleksi lainnya dengan jumlah terbatas seperti koleksi anak anak 8.209 judul, 22.095 eksemplar, koleksi referensi 28.657 judul, 83.487 eksemplar, koleksi majalah 10 jenis judul, koleksi langka 30 judul dan koleksi naskah kuno 32 naskah.

Selain pengadaan, bahan pustaka juga memerlukan pelestarian, dan perawatan diantaranya melalui perbaikan buku rusak dan alihmedia dalam rangka menjaga kelestariannya, dimana selama tahun 2020-2024 pelestarian /perawatan bahan pustaka telah dilakukan sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Perawatan Bahan Pustaka Tahun 2020-2024

No.	Jenis Koleksi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks
1	Koleksi alihmedia	200	200	151	151	162	162	223	223	-	-
2	CD/VCD/DVD	200	200	151	151	162	162	-	-	-	-
3	Buku rusak	-	1.130	990	990	1.322	1.322	1.007	1.007	1.001	1.001

Tabel 2.7 diatas menjelaskan bahwa pelestarian bahan pustaka melalui perawatan/ perbaikan buku rusak sampai dengan Tahun 2024 mencapai 5.450 eksemplar mengalami kenaikan s.d Tahun 2023. Sementara di Tahun 2024 mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah buku rusak dikarenakan (1) kesadaran para pemustaka dalam penggunaan bahan bacaan (2) Pemeliharaan buku melalui fumigasi terus dilakukan secara berkelanjutan. Berikut grafik perawatan bahan Pustaka tersebut di bawah ini :



Grafik 7. Perawatan Bahan Pustaka

Koleksi lainnya adalah koleksi langka merupakan himpunan bahan pustaka yang sudah tidak ada dipasaran, karena sudah tidak diterbitkan lagi oleh penerbitnya ataupun penerbitnya sudah tidak ada (tidak ada langka). Jumlah koleksi langka pada Dinas Perpustakaan Provinsi sebanyak 30 koleksi langka terdiri dari 25 buah buku (16 naskah islam dalam bentuk buku/kitab suci Al-Qur'an, 1 kitab undang-undang simbur cahaya, 1 buah materai dalam bentuk kertas, 1 buah piagam padang ratu, 1 buah papan nama garda, 5 buah buku koleksi presiden soekarno) dan 5 buah manuskrip serta koleksi naskah kuno. Koleksi naskah kuno merupakan himpunan bahan pustaka yang berusia 50 tahun atau lebih yang mempunyai nilai historis, maupun nilai universal dalam kategori isinya. Koleksi Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat sebanyak 32 naskah hasil penelusuran di 8 (delapan) kab/kota di Tahun 2024.

- a. Sembilan naskah kuno di Kab. Pali berupa gelumpai, batang bambu, bilah bambo
- b. Dua naskah kuno di Kab. Musi Banyuasin berupa gelumpai dan kertas eropa beraksara kaganga
- c. Satu Naskah Kuno berupa tongkat rotan selangit di Kab. Musi Rawas
- d. Satu Naskah Tanduk Kerbau dari Kota Lubuk Linggau
- e. Satu Naskah Kuno Kertas Eropa huruf jejawu Kab. OKI
- f. Satu Naskah Kuno Kertas Eropa beraksara kaganga Kab. Banyuasin
- g. Sepuluh Naskah Kuno media kertas eropa, kulit kayu dan buluh bambu dan 4 (empat) naskah kuno tanduk kerbau serta 3 (tiga) Naskah Kaghas Kab. Muara Enim.

Di samping itu terdapat juga 4 naskah kuno yang dialih aksara yaitu :

- a. Naskah Ma'din Al Asrar Fi Manhaj Al Abrar
- b. Kitab Abdul Habib Al Faghirani Abdullan Ibnu Sultan Mahmud Badaruddin.
- c. Naskah Syair Abdul Muluk Karya Raja Ali Haji Fi Manhaj Al-Abrar dan Kitab Nikij Abdul Habib.
- d. Suntingan Teks Asal usul Raja Palembang

Kegiatan Penghimpunan Naskah Kuno selama 5 (lima) tahun terakhir belum optimal dikarenakan kesulitan di dalam

mengidentifikasi keberadaan naskah kuno di masyarakat, serta kurangnya dukungan masyarakat terhadap perhatian pemerintah provinsi untuk berkontribusi dalam perawatan/pemeliharaan naskah kuno. Layanan Perpustakaan lainnya yang menjadi urusan perpustakaan adalah layanan meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan baik tenaga fungsional pustakawan maupun tenaga teknis pengelolaan perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi. Berikut tabel yang menggambarkan jumlah tenaga perpustakaan di Provinsi Sumsel.

Tabel 2.8
Tenaga Perpustakaan Terdata Dinas Perpustakaan Provinsi
Sumsel Tahun 2017 s.d 2024

No	Sumber Daya Manusia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pustakawan	78	78	88	147	185	189	185	185
	Provinsi	32	32	28	27	33	30	27	29
	Kab/kota	15	15	30	39	93	105	105	105
	Sekolah	3	3	2	2	3	2	0	0
	Perguruan Tinggi	28	28	28	73	39	40	40	40
	Khusus (Instansi)	-	-	-	6	17	12	13	13
2.	Tenaga Teknis	610	610	365	792	10.446	9.424	9.613	11.485
	Provinsi	56	56	54	45	72	59	90	65
	Kab/kota/kec/Desa/kel	65	65	123	123	1.123	2.011	2.116	2.247
	Sekolah	430	430	109	540	8.807	6.286	6.287	8.051
	Perguruan Tinggi	59	59	79	79	381	103	143	143
	Khusus	-	-	-	5	63	965	977	979
	Total	688	688	453	939	10.631	9.613	9.789	11.659

Penjelasan dari tabel 2.8 diatas bahwa ketersediaan tenaga perpustakaan di Provinsi Sumsel sebanyak 11.659 orang terdiri dari 185 orang tenaga pustakawan dan 11.485 orang tenaga teknis pengelola perpustakaan yang tersebar di berbagai jenis perpustakaan yang keberadaannya 94 orang di Perpustakaan Provinsi, 2.352 orang tersebar di Dinas Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota,Kecamatan dan Desa/Kelurahan, 8.051 orang di perpustakaan sekolah baik SD, SLTP, SLTA, 979 orang di Perpustakaan Khusus Selanjutnya pustakawan yang keberadaannya di Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 40 orang di antaranya di PT. UNSRI, PT. UIN, dan Politeknik. dan 13 orang di Perpustakaan Khusus Instansi di LPMP, Kemenkumham, Diknas, Bapelkes, Poltekes, Dinkop, Bandiklat, Agama, Kominfo dan Kesbangpol sebanyak 53 orang. Keberadaan tenaga perpustakaan mengalami peningkatan sebanyak 174 orang

dibandingkan Tahun 2023 yang berjumlah 11.485 orang. Berikut penyebaran pengelola perpustakaan berdasarkan grafik :



Grafik 8 Data Tenaga Perpustakaan se Sumsel

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, 1 (satu) tenaga fungsional dapat melayani 75.000 penduduk, sementara UNESCO/IFLA 1 (satu) orang tenaga pustakawan melayani 2.500 penduduk, artinya Sumatera Selatan masih membutuhkan 3.215 orang pustakawan dan 277 orang tenaga perpustakaan. Saat ini 1 orang pustakawan melayani 2.715 penduduk berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional

Selain itu terkait dengan tenaga pengelola teknis perpustakaan guna memenuhi kekurangan tenaga pustakawan, diperlukan tenaga teknis pengelola perpustakaan merupakan tenaga sukarela dengan insentif yang minim terutama di perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa/kelurahan sehingga mereka yang telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan sering sekali berpindah tempat bekerja mencari penghasilan yang lebih layak. Untuk itu melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis diharapkan Pengelolaan Perpustakaan khususnya Perpustakaan Kecamatan/Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah dapat terkelola sesuai standar perpustakaan. Penyelenggaraan Bimtek juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota, guna mempercepat pencapaian target pengelola perpustakaan yang telah mengikuti bimtek.

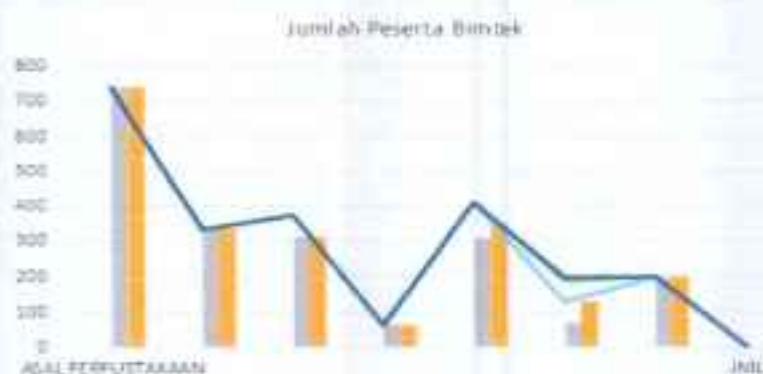
Berikut pengelola perpustakaan yang telah mengikuti Diklat/Orientasi Perpustakaan mulai tahun 2020-2024 tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Rekapitulasi Peserta Bimbingan Teknis Pengelola
Perpustakaan Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel
Tahun 2020 - 2024

NO	TAHUN	ASAL PERPUSTAKAAN							JML
		SEKOLAH			PT	INST	UMUM	RUMAH IBADAH	
		SD	SLTP	SMU					
1	2020	737	331	312	62	308	67	199	2.015
2	2021	737	331	312	62	348	127	199	2.115
3	2022	737	331	372	62	408	127	199	2.235
4	2023	737	331	372	62	408	187	199	2.275
5	2024	737	331	372	62	408	197	199	2.305

Tabel 2.9 di atas memberikan gambaran bahwa Perpustakaan Provinsi telah menyelenggarakan layanan bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan sebanyak 37 angkatan sejak tahun 2020-2024 dengan akumulasi peserta 2.305 orang. Peserta bimtek berasal dari tenaga pengelola di Perpustakaan Sekolah, Perguruan Tinggi, Rumah Ibadah, Instansi dan Perpustakaan Masyarakat. Di Tahun 2024 bimbingan teknis lebih diorientasikan pada peningkatan kompetensi 30 orang pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan pojok baca. Dari data yang dihimpun Bidang Pembinaan dan Penelitian, terinventarisir jumlah tenaga Perpustakaan yang terdata di 17 kabupaten/kota berjumlah 11.659 orang. Ini menunjukkan bahwa baru sekitar 19.77% tenaga perpustakaan yang telah memperoleh pendidikan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran untuk melaksanakan bimbingan teknis sangat minim setiap tahunnya dan jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang cukup banyak dan sering berganti dikarenakan tidak tersedianya insentif untuk mereka yang berstatus tenaga sukarela.

Grafik di bawah ini memberikan penjelasan terkait jumlah tenaga perpustakaan se Sumatera Selatan dari Tahun 2020 s.d 2024



Grafik 9 Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan

Selain bimtek, untuk masyarakat juga disediakan Layanan Program Magang, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian Mahasiswa. Berikut data masyarakat umum yang mengikuti program pembelajaran pengelolaan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel sebagaimana terangkum pada Tabel berikut :

Tabel 2.10
Data Magang di Perpustakaan Provinsi Sumsel
Tahun 2015-2024

No.	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Magang Perpustakaan	16	87	20	51	15	13	9	0	0	0
2.	Praktek Kerja Lapangan	4	11	8	10	-	-	38	8	33	7
3.	Penelitian Mahasiswa	3	75	16	8	27	7	9	13	31	23
4.	Universitas Terbuka	-	-	-	-	4	11	-	12	34	32
Total		23	173	44	69	46	31	56	33	98	62

Sumber Data : Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Dari tabel 2.10 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 s.d 2024 masyarakat yang memanfaatkan program Magang, Praktek Kerja Lapangan, Penelitian Mahasiswa sebanyak 635 orang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menariknya bidang Perputakaan di mata masyarakat. Program magang, praktek lapangan dan penelitian umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang dibimbing langsung oleh para pustakawan. Minat masyarakat terhadap Program Pembinaan Kualitas SDM sangat tinggi terutama bagi para siswa SMK. Berikut grafik data masyarakat yang magang di Dinas Perpustakaan Provinsi :



Grafik 10, Peserta Magang

Selain peingkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, kualitas kelembagaan perpustakaan menjadi tidak kalah pentingnya dalam memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Perpustakaan Provinsi sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan di bawah kewenangannya, telah melakukan pendataan dan pembinaan terhadap berbagai jenis perpustakaan secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan yang pada akhirnya perpustakaan dapat terakreditasi.

Berikut data berbagai jenis perpustakaan di Sumatera Selatan terdiri dari Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Khusus sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumsel Tahun 2017 s.d 2024

No.	Jenis Perpustakaan	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perpustakaan Umum	1.441	1.442	1.481	847	879	1.523	629	2.010
2	Perpustakaan Sekolah	9.014	9.233	13.918	8.353	8.416	7.009	5.088	5.087
3	Perpustakaan PT	121	127	132	94	171	95	108	108
4	Perpustakaan Khusus	765	780	783	783	46	818	261	259
5	Perpustakaan Digital	9	12	12	12	12	-	-	-
Total		11.123	11.350	11.595	16.326	10.089	9.524	6.086	7.464

Sumber Data : Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegermarn Membaca dan data.perpusnas.go.id



Grafik 11 Data Perpustakaan Prov Sumsel

Tabel 2.11 di atas menjelaskan bahwa jumlah perpustakaan di Provinsi Sumsel terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2023

berjumlah 6.086 perpustakaan, sementara di Tahun 2024 meningkat menjadi 7.464 perpustakaan terdiri dari 2.010 Perpustakaan Umum, 5,087 Perpustakaan Sekolah, 108 Perpustakaan Perguruan Tinggi dan 259 Perpustakaan Khusus. Sebagai data pembandingan berdasarkan sumber Perpustakaan Nasional RI dimana perpustakaan di Sumsel berjumlah 5.955 Perpustakaan terdiri dari : 631 Perpustakaan Umum, 4.957 Perpustakaan Sekolah, 108 Perpustakaan Perguruan Tinggi, 259 Perpustakaan Khusus. Meningkatnya jumlah perpustakaan umum dikarenakan tersebarnya keberadaan perpustakaan desa bantuan Perpustakaan Nasional RI baik Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perpustakaan Bahan Bacaan Bermutu dan Pojok Baca Desa/Kelurahan. Sementara perpustakaan yang belum terkelola sesuai standar dan masih memerlukan pembinaan secara berkelanjutan, selama 8 (delapan) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rekapitulasi Perpustakaan Yang Telah Dibina
di Provinsi Sumsel Tahun 2017 s/d Tahun 2024

No	Perpustakaan	Tahun Anggaran								Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Perpustakaan Umum Kab/Kota	4	9	17	0	-	-	-	-	
2.	Perpustakaan Khusus (Instansi)	0	0	0	1	-	-	1	-	
3.	Perpustakaan Sekolah									
	a. SD/MI	2	0	8	0	-	-			
	c. SMP/MTs	3	0	10	0	-	-			
	f. SMA/MA/SMK	13	60	45	35	68	161	44	49	
4.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	0	0	3	0	-	47	-	-	
5.	Perpustakaan Desa/Kelurahan	3	0	2	0	-		-	-	
Total		25	69	85	36	68	208	45	49	625

Saat ini pembinaan perpustakaan telah dilakukan terhadap 625 Perpustakaan sejak Tahun 2017 s.d 2024, 25 unit Perpustakaan di tahun 2017, 69 unit Perpustakaan di tahun 2018, 85 unit Perpustakaan di tahun 2019, 36 unit Perpustakaan di tahun 2020, 68 unit di tahun 2021, dan 208 unit Perpustakaan di tahun 2022 dan 45 unit di Tahun 2023 dan 49 unit di Tahun 2024. Dilihat dari jumlah perpustakaan yang sangat banyak dan tersebar di 17 kabupaten/kota, sementara terbatasnya perpustakaan yang dibina sangat terbatas jumlahnya dikarenakan terbatasnya anggaran pembinaan. Selama pelaksanaan kegiatan pembinaan, hal hal yang

menjadi permasalahan adalah 1) Jumlah Perpustakaan yang belum memenuhi SNP sangat banyak, sementara alokasi anggaran pembinaan sangat minim 2) Pembinaan dilakukan tidak berkesimbangan 3) Minimnya tenaga fungsional pustakawan sebagai Pembina teknis dalam pengelolaan perpustakaan 4) Masih banyak kondisi perpustakaan yang belum terdata sebagai dasar pembinaan. Oleh karena itu Kegiatan pembinaan diharapkan dapat menjadi prioritas setiap tahunnya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah perpustakaan yang berstandar Nasional Perpustakaan dan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Data Perpustakaan ber SNP dan Non SNP Tahun 2024

No	Kota/Kab	Sekolah		Perguruan Tinggi		Umum		Khusus		Sub Total		Total
		SNP	NSNP	SNP	NSNP	SNP	NSNP	SNP	NSNP	SNP	NSNP	
1	Kab. OKU	88	144	1	5	48	10	0	3	137	162	299
2	Kab. OKI	177	230	3	1	134	28	2	1	316	260	576
3	Kab. M.Enim	240	165	2	1	181	40	0	12	423	218	641
4	Kab. Lahat	172	132	0	3	168	26	1	0	341	161	502
5	Kab. Mura	142	138	1	0	148	40	1	4	292	182	474
6	Kab. Muba	197	234	3	0	116	14	1	2	317	250	567
7	Kab. Banyuasin	369	124	1	0	206	32	6	40	582	196	778
8	Kab. OKUT	152	196	6	2	174	8	0	3	332	209	541
9	Kab. OKUS	76	78	1	0	64	3	0	0	141	81	222
10	Kab. OI	112	275	2	2	109	44	0	5	223	326	549
11	Kab. E. Lawang	128	69	0	0	60	23	0	1	188	93	281
12	Kota Palembang	371	209	56	2	33	71	10	131	470	413	883
13	Kota P. Alam	101	14	4	0	24	9	0	1	129	24	153
14	Kota Linggau	146	33	8	1	68	6	0	5	222	45	267
15	Kota Prab	132	92	2	0	9	19	22	5	165	116	281
16	Kab. Pali	80	101	1	0	1	23	0	3	82	127	209
17	Kab. Muratara	112	61	1	0	62	5	0	0	175	66	241
Total		2795	2295	92	17	1605	401	38	216	4535	2929	7464

Data 2.13 di atas menjelaskan bahwa dari 7.464 perpustakaan yang terdata, 4.535 perpustakaan telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dan 2.929 Perpustakaan belum memenuhi Standar. Jumlah perpustakaan terbanyak yang belum memenuhi standar adalah Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Umum yang jumlah terbesar berada di Kab. Muara Enim, Kota Palembang dan Kab. Ogan Ilir. Kondisi ini dikarenakan belum terimplementasinya Undang

Undang Nomor 43 Tahun 2027 tentang Perpustakaan pada pasal Pasal 23 ayat 6, bahwa paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan serta belum adanya dukungan regulasi dari Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang penggunaan dana desa Tahun 2025. Berikut grafik data perpustakaan ber SNP dan Non SNP.



Grafik 12. Data Perpustakaan Ber SNP dan Non SNP

Dalam menjalankan fungsi pembinaan, perpustakaan provinsi menyediakan layanan klinik akreditasi dalam rangka mempercepat pemenuhan persyaratan pengusulan akreditasi perpustakaan guna memenuhi Standar Nasional Perpustakaan, namun sejumlah perpustakaan sudah terakreditasi walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Saat ini jumlah Perpustakaan terakreditasi baru mencapai 397 perpustakaan, salah satu penyebabnya adalah Pemerintah Daerah belum diberikan kewenangan secara penuh oleh Pemerintah Pusat untuk menerbitkan sertifikat akreditasi perpustakaan mengingat jumlah perpustakaan yang belum terakreditasi sangat banyak tersebar di kabupaten/kota dan membutuhkan waktu yang lama untuk menilai akreditasi perpustakaan secara keseluruhan serta masih rendahnya pemahaman akan pentingnya akreditasi. Berikut jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.14
Perpustakaan Terakreditasi di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012-2024

No	Tahun	Palembang	Banyu Asin	Mu Ba	Lahat	Muara Enim	Lubuk Linggau	OKUT	Pagar Alam	Empat Lawang	Pati	PraBu	MuRa	OKI	Mura Tara	OKU	Oi	OKUS	Total
1.	2012	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2.	2013	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3.	2014	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4.	2015	4	1	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5.	2016	4	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6.	2017	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
7.	2018	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	28
8.	2019	3	-	-	1	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
9.	2020	1	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
10.	2021	19	1	2	2	14	12	2	-	1	7	2	7	3	1	-	-	-	73
11.	2022	9	3	3	-	10	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-	7	-	40
12.	2023	15	0	0	1	27	1	-	2	-	8	0	9	5	20	5	7	1	101
13.	2024	12	7	0	4	12	2	3	9	-	8	2	7	5	3	9	1	8	92
	Total	75	12	10	9	64	74	8	13	1	24	6	24	15	24	14	15	9	397

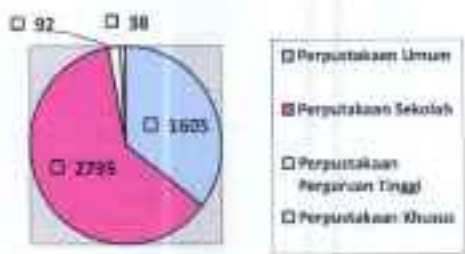
Sebagaimana tersebut pada tabel 2.14 di atas menjelaskan bahwa jumlah perpustakaan terakreditasi di Provinsi Sumsel sebanyak 397 perpustakaan tersebar di 17 Kabupaten/Kota, dimana Kota Lubuk Linggau merupakan daerah terbanyak yang memiliki Perpustakaan terakreditasi di susul oleh Kota Palembang.

Berikut lima standar nasional yang menjadi acuan dalam pendirian perpustakaan, yaitu:

- (1) a. SNP 002:2011 Perpustakaan Provinsi
- (2) b. SNP 003:2011 Perpustakaan Umum Kab/Kota
- (3) c. SNP 004:2011 Perpustakaan Kecamatan
- (4) d. SNP 005:2011 Perpustakaan Desa/Kelurahan
- (5) e. SNP 006:2011 Perpustakaan Khusus

Berbicara mengenai perpustakaan terakreditasi dapat kami informasikan bahwa Jumlah perpustakaan s.d tahun 2024 di Sumsel berjumlah 7.464 perpustakaan terdiri dari 2.010 perpustakaan umum, 4.945.0875 perpustakaan sekolah, 108 Perpustakaan Perguruan Tinggi dan 259 Perpustakaan Khusus. Sementara perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berjumlah 4.535 perpustakaan atau 60,75% (sumber: Perpustakaan

Nasional, Tahun 2024). Persentase jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar SNP dapat dilihat pada gambar berikut.



Grafik 13. Perpustakaan terbina sesuai SNP

Di sisi lain guna mendukung pemerataan layanan perpustakaan maka melalui Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel memfasilitasi, membangun dan mendirikan pojok-pojok baca baik pendirian pojok baca desa/kelurahan, pojok baca digital yang keberadaannya ditempatkan di area-area publik maupun pendirian perpustakaan berbasis inklusi sosial. Gambaran secara umum keberadaan pojok baca, perpustakaan berbasis inklusi sosial dan perpustakaan digital tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.15
Data Perpustakaan Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklus Sosial di Sumatera Selatan s.d Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Desa/Kel Penerima Bantuan TPBIS	Desa/Kel Penerima Bantuan Pojok Baca	Desa/Kel Penerima Bantuan Pojok Baca Digital	Desa/Kel Bantuan bln Bacaan Bermutu
1.	OKU	4	2	1	12
2.	OKI	5	3	1	14
3.	Muara Enim	6	6	1	8
4.	Lahat	-	5	1	14
5.	Musi Rawas	20	5	1	17
6.	Musi Banyuasin	6	2	1	19
7.	Banyuasin	5	7	1	15
8.	OKU Selatan	3	4	1	4
9.	OKU Timur	4	7	1	9
10.	Ogan Ilir	2	4	-	60
11.	Empat Lawang	3	5	1	8
12.	Pali	5	3	-	11
13.	Muratara	6	5	1	22
14.	Palembang	4	7	1	35
15.	Prabumulih	3	3	1	3
16.	Pagar Alam	-	3	1	8
17.	Lubuk Linggau	25	4	1	27
Total		98	75	17	286

Sebagaimana tergambar pada tabel 2.15 di atas bahwa Program Strategis Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam Membangun Sumber Daya Manusia telah berjalan sejak Tahun 2020 s.d 2024 melalui bantuan pendirian pojok baca ke 98 desa/kelurahan di 17 kabupaten/kota, pendirian pojok baca digital (pocadi) di fokuskan pada area- area publik bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan (hoax) serta bantuan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial berupa Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yaitu sebuah program di mana fungsi perpustakaan mengalami paradigma dari tempat peminjaman dan pengembalian buku menjadi pusat berkegiatan masyarakat. Di samping keberadaan Perpustakaan TPBIS, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel juga mendirikan berbagai pojok baca desa dan pojok baca ruang publik dalam rangka mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat.

Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Capaian Pelaksanaan Urusan Perpustakaan terkait IKU dan IKK dapat kami sampaikan bahwa secara umum nilai TGM Provinsi Sumsel sejak tahun 2022-2024 masih dalam kategori sedang, di Tahun 2024 terdapat 4 kabupaten/kota dengan nilai TGM tinggi di atas nilai rata rata nasional yaitu Kab. Empat Lawang, Kab. Ogan Ilir, Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang, sedangkan 3 Kabupaten/Kota dengan nilai Tingkat Kegemaran Membaca terendah yaitu Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Banyuasin dan Kota Prabumulih. Berikut gambaran secara umum kondisi Tingkat Kegemaran Membaca di Provinsi Sumsel dalam bentuk grafik.



Grafik 14. Target dan capaian TGM tingkat Provinsi Sumsel

Sementara untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2022 – 2024 berfluktuatif cenderung menurun, dimana di Tahun 2024 terdapat 8 Kabupaten/Kota dengan Nilai IPLM tertinggi yaitu Kab. Lahat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. Pali, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang dan Kota Prabumulih dengan nilai di atas 70,00. Sedangkan IPLM terendah terdapat di Kab. OKU Timur, Kab. OKU Selatan, Kab. OKU dan Kab. OKI (5 Kabupaten) dengan nilai di bawah 50,00. Beberapa permasalahan : 1) Tingkat ketercukupan koleksi perpustakaan masih rendah dan belum memenuhi standar 2) tingkat kemanfaatan koleksi oleh pemustaka masih rendah, 3) tenaga perpustakaan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat 4) tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari masih rendah, Frekwensi pembinaan perpustakaan tidak lebih dari satu kali serta tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anggota perpustakaan masih rendah.



Grafik 15 : Target dan Capaian IPLM

Dari grafik, gambar serta data yang disajikan dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas indikator TGM dan IPLM dalam RPJMD Tahun 2020-2024 masih berada di bawah rata rata nasional yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Dari grafik tersebut di atas diinformasikan juga penyajian data data terkait capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang perpustakaan meliputi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Capaian atas Pelaksanaan IKU dan IKK Urusan Perpustakaan
Tahun 2020 s.d 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skala Nilai	52,38	55,84	61,52	64,15	69,62
2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	12,43	14,57	15,62	14,42	15,18
3	Meningkatnya tata kelola adminsitasi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Perpustakaan	Persentase terwujudnya tata kelola adminsitasi Pemerintah Perangkat Dacrah di Lingkungan Perpustalaan	%	100	100	100	100	100

Tabel 2.16 di atas memberikan informasi kepada kita bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Sumsel (TGM) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perpustakaan sejak Tahun 2020 s.d 2024 dengan capaian sebagaimana tersaji pada tabel tersebut di atas. Sementara untuk capaian dari kedua indikator tersebut selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan melebihi target yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, namun berdasarkan hasil kajian/penelitian terhadap kedua indikator tersebut yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI terhadap Provinsi Sumsel, Capaian atas pelaksanaan kedua indikator tersebut masih berada di bawah rata rata nasional dengan tingkat capaian IPLM di Tahun 2024 sebesar 15,18 indeks (urutan ke 16 secara nasional) dan TGM mencapai 69,62 skala nilai (urutan ke 18), dimana untuk Tahun 2024 ditetapkan rata rata nasional untuk indikator IPLM sebesar 15,45 indeks, sementara rata rata Nasional untuk TGM sebesar 72,44 skala nilai dengan kategori sedang. Adapun beberapa unsur pembangun literasi masyarakat yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumsel dikarenakan skor

masih berada di bawah 1,0000 adalah 1) *Pemerataan Layanan Perpustakaan*, 2) *Ketercukupan Koleksi Perpustakaan* 3) *Ketercukupan Tenaga Perpustakaan* 4) *Tingkat Kunjungan Masyarakat*. Sementara untuk Tingkat Kegemaran Membaca terdapat pada unsur frekwensi membaca bahan bacaan per minggu dan durasi membaca bahan bacaan perhari pada kelompok pelajar serta Jumlah buku yang dibaca selama tiga bulan paling rendah juga pada kelompok pelajar .

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel merupakan unsur pelaksana/teknis Pemerintah Provinsi Sumsel di dalam urusan Perpustakaan, maka diaturlah susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel di dalam Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 42 Tahun 2016 yang menggambarkan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dimana Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di bidang Perpustakaan yang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Perpustakaan;
2. Penyelenggaraan urusan pelayanan, perencanaan, ketatausahaan,perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
3. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
4. Penyelenggaraan, pengelolaan, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam;
5. Penyelenggaraan, pencetakan dan penerbitan karya ilmiah dan karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya;
6. Penyelenggaraan pengembangan koleksi melalui pengadaan bahan perpustakaan, hunting, hibah, transliterasi dan translasi;
7. Penyelenggaraan penerimaan, pengolahan, deskripsi bibliografi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan

- perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data;
8. Penyelenggaraan layanan perpustakaan melalui sistem otomasi perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
 9. Penyelenggaraan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
 10. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan;
 11. Penyelenggaraan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pengkajian minat baca masyarakat, sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi pembudayaan kegemaran membaca;
 12. Penyelenggaraan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alih media dan konservasi;
 13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sementara susunan organisasi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel terdiri dari (1) Sekretariat, (2) Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, (3) Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan, (4) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan (5) Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan dengan masing-masing bidang memiliki tugas sebagai berikut :

I. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka sekretariat mempunyai fungsi :

- 1.1. Pelaksanaan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- 1.2. Pelaksanaan urusan perencanaan meliputi penyusunan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 1.3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian yang meliputi urusan persuratan, kearsipan, serta kepegawaian;

- 1.4. Pelaksanaan urusan keuangan meliputi urusan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai, verifikasi dan akuntansi;
- 1.5. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- 1.6. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- 1.7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaannya demi kelancaran tugas Sekretaris dibantu oleh; Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

- a. Menyiapkan, menyusun, dan menganalisis bahan rencana perumusan kebijakan, program dan kegiatan jangka pendek dan jangka panjang;
- b. Menyiapkan, menghimpun, menyusun dan menganalisis bahan rencana anggaran;
- c. Melaksanakan penghimpunan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- d. Melaksanakan kegiatan akuntabilitas, mengevaluasi dan menyusun pelaporan program, kegiatan dan anggaran;
- e. Melakukan evaluasi pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai serta hak-hak lainnya;
- b. Memeriksa urusan pengujian dan verifikasi terhadap dokumen keuangan;
- c. Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- d. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, persuratan dan rumah tangga;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - c. Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - d. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perawatan, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban bangunan gedung dan peralatan kerja;
 - f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media dan hubungan antar lembaga;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

II. BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan deposit hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, terbitan daerah, pengembangan koleksi, serta pengolahan bahan pustaka. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan deposit meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta penyusunan literature sekunder;
2. Pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi dan pengembangan koleksi daerah serta pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka;
3. Pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian

fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkatan data;

4. Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaannya demi kelancaran tugas Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dibantu oleh; (1) Seksi Deposit dan (2) Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.

(1) Deposit mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- b. Melaksanakan penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar nama dan alamat penerbit;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- e. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyimpanan bahan perpustakaan;
- f. Merencanakan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan penerbit, perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan kebijakan pengembangan koleksi
- b. Melakukan hunting, seleksi, inventarisasi dan desiderata bahan perpustakaan;
- c. Melakukan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah dan tukar menukar bahan perpustakaan;
- d. Melakukan penganekaragaman bahan perpustakaan mencakup kegiatan transliterasi, translasi dan sejenisnya;
- e. Mengerjakan penerimaan, pengolahan dan verifikasi bahan perpustakaan;

- f. Mengerjakan penyusunan deskripsi, bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
- g. Melaksanakan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data;
- h. Penyusunan literatur sekunder;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

III. BIDANG LAYANAN, OTOMASI, KERJASAMA PERPUSTAKAAN

Bidang Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan layanan perpustakaan melalui otomasi perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta membangun kerjasama dan jejaring perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, maka Bidang Layanan, Otomasi, dan Kerja Sama Perpustakaan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan layanan perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca dan sejenisnya), promosi layanan dan pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka;
2. Pelaksanaan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kerja sama perpustakaan meliputi kerjasama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaannya demi kelancaran tugas Bidang Layanan, Otomasi, dan Kerja Sama Perpustakaan dibantu oleh; (1) Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan, dan (2) Seksi Kerja Sama Perpustakaan.

- (1) Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;

- b. Melakukan penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
- c. Melakukan penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca dan sejenisnya);
- d. Melakukan penyusunan statistik perpustakaan;
- e. Melakukan bimbingan pemustaka;
- f. Melakukan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan;
- g. Melakukan promosi layanan;
- h. Menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan melalui penyediaan kotak saran;
- i. Mengerjakan kajian kepuasan pemustaka;
- j. Mengerjakan pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan pangkalan data;
- k. Mengerjakan pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan website;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Kerja Sama Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan inisiasi kerjasama perpustakaan;
- b. Mengerjakan pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerjasama;
- c. Mengerjakan pengembangan dan pengelolaan kerjasama antar perpustakaan;
- d. Mengerjakan pengembangan dan pengelolaan kerja sama jejaring perpustakaan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

IV. BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran membaca. Bidang

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan dan pemasyarakatan /sosialisasi serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis peningkatan kemampuan teknis pustakawan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
- c. Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca;
- d. Pelaksanan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaannya demi kelancaran tugas Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dibantu oleh; (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan, dan (3) Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan bertugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. Melaksanakan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. Melaksanakan pendataan perpustakaan;
 - d. Melaksanakan koordinasi pengembangan perpustakaan;
 - e. Melaksanakan pemasyarakatan/ sosialisasi, dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pendataan tenaga perpustakaan;
 - b. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan teknis pustakawan;
 - c. Melakukan penilaian angka kredit pustakawan;
 - d. Melakukan koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan;
 - e. Melaksanakan pemasyarakatan/ sosialisasi;
 - f. Melakukan pembinaan tenaga perpustakaan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca bertugas :
- a. Melakukan pengkajian minat baca masyarakat;
 - b. Melakukan pembudayaan kegemaran membaca;
 - c. Melakukan pengkoordinasian pemasyarakatan/ sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca;
 - d. Melakukan bimbingan teknis;
 - e. Melakukan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

V. BIDANG PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan alih media, pelestarian nilai-nilai informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno, konservasi, perbaikan serta perawatan bahan perpustakaan. Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan alih media meliputi pelestarian isi/nilai, informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno;
2. Pelaksanaan konservasi meliputi pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan;
3. Pelaksanaan perbaikan dan perawatan bahan perpustakaan meliputi penjilidan bahan perpustakaan;

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaannya demi kelancaran tugas Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan dibantu oleh; (1) Seksi Alih Media, dan (2) Seksi Konservasi, Pelestarian dan Perawatan Bahan Perpustakaan.

- 1) Seksi Alih Media mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital;
 - b. Melakukan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
 - c. Melakukan penempelan identitas pada kotak mikrofilm/digital;
 - d. Melaksanakan pemasukan data pada komputer;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan master refrografi, fotografi dan digital;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Seksi Konservasi, Pelestarian dan Perawatan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan survey kondisi bahan perpustakaan;
 - b. Melakukan fumigasi bahan perpustakaan;
 - c. Memeriksa dan mengontrol kondisi ruang penyimpanan;
 - d. Melakukan pembersihan debu dan noda bahan perpustakaan;
 - e. Melaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mending (perbaikan), bahan perpustakaan;
 - f. Melakukan survey kondisi bahan perpustakaan;
 - g. Melakukan penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;
 - h. Melaksanakan pembuatan folder, pamflet binding dan cover;
 - i. Pembuatan map dan portepel bahan perpustakaan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Perangkat Daerah adalah kekuatan/potensi organisasi Perpustakaan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya informasi. Terkait dengan Sumber Daya Manusia telah dijelaskan sebelumnya. Sementara Sumber Daya Kelembagaan merupakan berbagai jenis perpustakaan yang tersebar di wilayah Provinsi Sumsel baik itu Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Umum Kab/Kota, Perpustakaan Desa/Kelurahan/Kecamatan dan Perpustakaan Khusus yang jumlahnya mencapai 7.474 perpustakaan. Selanjutnya untuk Sumber Daya Informasi adalah ketercukupan koleksi yang memadai baik jenis, judul, varian dan eksemplar serta ketercukupan tenaga perpustakaan kompetensi baik bagi pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan. Sumber daya lainnya adalah ketersediaan sarana prasarana yang memadai terutama berbagai fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pengunjung perpustakaan serta dukungan peralatan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi guna mempercepat proses pelayanan, sarana akses informasi dan sarana temu kembali informasi bahan perpustakaan oleh pemustaka, sistem sirkulasi layanan berfungsi dengan baik, sehingga penelusuran informasi secara cepat dalam mencari buku atau referensi yang dibutuhkan dan kegiatan perpustakaan terintegrasi menjadi satu. Namun dibalik itu semua itu, demografi penduduk Sumatera Selatan menjadi peluang yang akan membuka perkembangan minat dan budaya baca di masa mendatang menjadi lebih baik, dengan harapan masyarakat pengguna perpustakaan menjadi lebih membudaya dan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dapat dilakukan dimana saja dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai

Di dalam menjalankan tugas pokok fungsinya, diperlukan sumber daya manusia, tergambar dalam sebuah struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel yang terdiri dari 29 orang pejabat fungsional pustakawan yang merupakan motor penggerak dan kunci keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan seluruh kegiatan Perpustakaan yang dipimpin oleh 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala

Seksi, 3 orang Kepala Sub Bagian, dan 1 orang Ketua Kelompok Pustakawan dengan susunan organisasi sebagai berikut :



Bagan 1 : Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel

Tersedianya tenaga pustakawan yang berkompoten dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dan secara teknis juga menguasai ilmu Perpustakaan dan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan yang dibekali oleh pendidikan/pelatihan di bidang perpustakaan, merupakan aspek teknis yang terus diperhatikan dan ditingkatkan kompetensinya sehingga menjadi tenaga perpustakaan yang profesional di bidangnya.

Secara umum pegawai Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 2024 berjumlah 65 orang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 38 orang perempuan. Berikut gambaran rincian klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat/ golongan, pendidikan, jabatan, dan usia.

[illegible]

Sumber Data : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Tabel 2.17 di atas menjelaskan berdasarkan pangkat dan golongan, ASN Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel terdiri dari 18 orang pejabat struktural, 29 orang pejabat fungsional dan 18 non struktural. Dilihat dari tingkat pendidikan, terdiri dari 20 orang lulusan S2, 33 orang pegawai lulusan S1, 4 orang pegawai lulusan D3, 3 orang pegawai lulusan SMA, dan 3 orang pegawai lulusan SMP. Untuk Usia digolongkan ke dalam umum 50-60 tahun sebanyak 37 orang, usia 40-49 tahun sebanyak 22 orang, usia 30-39 tahun sebanyak 6 orang dengan laki-laki 27 orang, 38 orang perempuan.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dalam urusan perpustakaan selama lima tahun terakhir, diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan yang diberikan kepada pemustaka/masyarakat dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dengan mengukur 10 indikator pelayanan yakni persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan dan sarana prasarana. Capaian atas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.18
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2020 s.d 2024 Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel

No	Uraian	Capaian Tahun Ke				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	84,00	84,00	90,12	90,57

Tabel 2.1.8 di atas menjelaskan bahwa capaian Nilai Indeks Kepuasan Untuk Layanan Perpustakaan di Tahun 2024 mencapai 90,575 indeks dengan kategori sangat baik terhadap 10 indikator pengukur, terdapat kenaikan 0,45 point dibandingkan capaian Tahun 2023 sebesar 90,12 indeks dan Tahun 2022 sebesar 86,66 indeks dari target yang ditetapkan Terhadap capaian Tahun 2022 sebesar 85,00 indeks dan Tahun 2021 sebesar 84,00 indeks terjadi penurunan 1,00 point. Adapun unsur unsur layanan yang menjadi

dasar dalam menentukan kualitas pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Terdapat 4 (empat) unsur terendah dari 10 (sepuluh) unsur pengukur yang perlu dilakukan percepatan tindak lanjut yaitu :

1. Sarana Prasarana, perlu dilakukan perbaikan layanan dan penambahan fasilitas yang nyaman untuk masyarakat. Lampu yang kurang terang, wifi yang lemot, perbaikan wastafel untuk cuci tangan, tempat untuk ngeprint bagi mahasiswa, setiap meja diberikan colokan atau stop kontak agar memudahkan pemustaka dalam pengisian baterai.
2. Perlu adanya kualitas layanan dengan menyediakan data yang lebih lengkap akurat up to date sehingga bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian Kembali tentang informasi buku yang ada pada rak buku dengan daftar yang ada pada computer. Hendaknya letak buku disesuaikan dengan raknya/kode agar mempermudah pembaca untuk mencari buku, Pelayanan perlu ditingkatkan terutama penjaga /petugas peminjaman buku dan Jam layanan yang dibuka sampai dengan pukul 17.00
3. Koleksi Perpustakaan, diharapkan dapat diperbanyak untuk judul buku terutama untuk pelajar dan mahasiswa khususnya buku challenge dan novel. Berikut Unsur Penilaian atas capaian indeks kepuasan masyarakat sebagaimana tertuang di dalam tabel berikut :

Tabel 2.19
Hasil Pengukuran Nilai Inde Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan tahun 2023	Kinerja Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan tahun 2024	Kinerja Unsur Pelayanan
1.	Persyaratan pelayanan	3,328	Sangat Baik	3,487	Sangat Baik
2.	Prosedur pelayanan	3,538	Sangat Baik	3,528	Sangat Baik
3.	Waktu pelayanan	3,458	Sangat Baik	3,532	Sangat Baik
4.	Biaya/tarif	3,908	Sangat Baik	3,988	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,438	Sangat Baik	3,385	Sangat Baik
6.	Kompetensi pelaksana	3,430	Sangat Baik	3,510	Sangat Baik
7.	Prilaku pelaksana	3,508	Sangat Baik	3,537	Sangat Baik
8.	Maklumat pelayanan	3,705	Sangat Baik	3,723	Sangat Baik
9.	Penanganan pengaduan	3,858	Sangat Baik	3,753	Sangat Baik
10	Sarana dan prasarana	3,865	Sangat Baik	3,8893	Sangat Baik
NILAI INDEK		3,605		3,623	
NILAI IKM		90,125		90,575	
Mutu Pelayanan		A		A	
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik		Sangat Baik	

Berbicara mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sampai saat ini SPM yang menyelenggarakan urusan perpustakaan belum di atur oleh Lembaga/Kementerian. Jenis SPM yang ada baru mencakup 11 urusan yaitu Kesehatan, social, lingkungan hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana, Pendidikan Dasar, Penataan Ruang, Ketenagakerjaan, Komunikasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan dan Penanaman Modal.

Kegiatan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Provinsi saat ini harus lebih cepat, tepat, sederhana, prosedur dan memiliki mekanisme yang jelas. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi membawa perubahan pada Sistem Manajemen Perpustakaan, yang semula Perpustakaan Umum konvensional menjadi perpustakaan digital. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, peran teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan kita dapat melakukan layanan yang cepat dengan jangkauan layanan yang lebih luas serta mutu yang lebih baik.

Perkembangan dari penerapan **teknologi** informasi dan komunikasi telah diterapkan/ digunakannya sebagai **Sistem Informasi** Manajemen (SIM) merupakan pengintegrasian antara bidang pekerjaan administrasi, pengadaan, inventarisasi, **katalogisasi**, pengolahan, sirkulasi, statistik, pengelolaan anggota perpustakaan. Di sisi lain perpustakaan diharapkan mampu merancang **layanan perpustakaan** yang memungkinkan akses terhadap sumber-sumber **informasi** (*information resources*), sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan setiap saat dan dari berbagai tempat dimanapun pengguna berada. Kondisi ini belum sepenuhnya dilaksanakan di Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, untuk itu faktor - faktor penghambat upaya **meningkatkan layanan perpustakaan** berorientasi kepada penggunaan peralatan perpustakaan berbasis teknologi informasi komunikasi dimana minimal sebuah perpustakaan harus memiliki:

- a. Jaringan Lokal (LAN , *Local Area Network*) berbasis TCP/IP

- b. Akses ke internet yang cepat bagi **pustakawan** untuk mengakses informasi eksternal perpustakaan beserta perangkatnya.
- c. Komputer untuk pengguna untuk mengakses informasi layanan perpustakaan berikut database persediaan koleksi yang dimiliki perpustakaan tersebut.
- d. Koleksi dalam multi format baik dalam bentuk tercetak, **multimedia**, digital, hypertext berikut sarana untuk mengakses koleksi tersebut
- e. Adanya fasilitas digital dan internet, dimana **pengguna** dapat memanfaatkan informasi yang dimiliki perpustakaan tanpa mengenal waktu dan jarak. *Home page* perpustakaan dapat menyajikan data bibliografis dan abstrak dari jurnal-jurnal penelitian (kalau memungkinkan dalam bentuk *full text*), pendidikan pemakai, berita-berita perpustakaan, informasi lokal (pameran online, media komunikasi dengan pengguna (saran dan kritik), hubungan dengan situs lain, dan sebagainya.
- f. *Hot Spot*, layanan internet bebas untuk suatu lingkungan yang terbatas, sebagai contoh di sekitar gedung perpustakaan. Dengan memiliki hot spot ppenyediaan jasa penclusuran internet yang dapat diakses oleh pengguna dari Laptop/Note Book yang biasa dibawa oleh pengguna, dengan syarat memiliki LAN Card Wireless.

Beberapa faktor penghambat pelayanan perangkat daerah :

1. Kondisi Gedung Perpustakaan belum memadai, walaupun untuk tata ruang telah memenuhi seluruh ruangan yang memiliki fungsi yang berbeda beda. Namun kondisi ruangan perlu mendapat perhatian yang serius karena masih belum memberikan rasa nyaman kepada pengunjung perpustakaan.
2. Fasilitas ruangan yang belum memadai, dimana sebagian besar perabot perpustakaan dalam kondisi yang perlu mendapat perbaikan.
3. Belum tersedianya ruangan dan fasilitas layanan perpustakaan untuk para disabilitas.
4. Resiko keamanan manusia masih kurang hal ini dikarenakan kondisi gedung perpustakaan yang tidak representatif

memerlukan perbaikan – perbaikan dan dana yang besar untuk melakukan rehab berat

Beberapa faktor pendorong pelayanan perangkat daerah

1. Lokasi Gedung Perpustakaan Provinsi yang sangat strategis di permukaan tanah yang tinggi, mudah dijangkau, berada di tengah pemukiman berada penduduk, perkantoran dan sekolah sertaterhindar dari banjir, tanah longsor.
2. Gedung perpustakaan berada di tanah yang luasnya 5.992m²,sehingga memungkinkan untuk penambahan ruangan.
3. Jumlah penduduk yang terus meningkat di lokasi berdirinya perpustakaan menjadi peluang peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.20
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	15,33		12,3	12,65	13	13,5	16,5	12,43	14,57	15,62	14,42	15,18	101,06	115,18	120,15	106,81	92,00
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	-	70,00		51,98	53,16	55,48	57,19	68	52,38	55,84	61,52	64,15	69,62	100,77	105,04	110,89	112,17	102,38
3	Persentase terwujudnya tata kelola administrasi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Perpustakaan	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.21
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1.																	
Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan	16.728.681.950	21.598.873.000	20.815.531.625	39.544.669.102	21.354.937.593	24.138.547.526	20.062.898.109	16.792.090.362	15.580.071.043	20.167.697.505.38	84,52	92,89	80,87	79,72	90,44	17	18
																7,16	11,96

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kelompok sasaran pelayanan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel adalah pemustaka yang memanfaatkan berbagai fasilitas diversifikasi layanan perpustakaan terdiri dari siswa, mahasiswa, dosen, PNS, TNI, Polri, Swasta, Wirausaha, dll, namun kelompok pemustaka yang memanfaatkan koleksi baik konvensional maupun digital umumnya diakses oleh mahasiswa. Kelompok sasaran lainnya adalah berbagai jenis perpustakaan meliputi Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Khusus yang menjadi binaan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel. Selanjutnya dalam rangka pembelian, pengadaan guna memperkaya koleksi perpustakaan diorientasikan pada kelompok sasaran penerbit, konsersium buku, toko buku, Pemerintah daerah. Kemudian untuk layanan pelestarian bahan pustaka diorientasikan pada masyarakat pemilik naskah kuno, museum, perpustakaan nasional.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Berbicara mengenai mitra Dinas Perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdiri dari **para pendongeng** yang berkontribusi pada kegiatan kegiatan story telling, **penulis, penerbit** yang berperan di dalam menginformasikan buku buku terbitan ter update untuk selanjutnya dikonsumsi oleh Perpustakaan Provinsi serta **para komunitas dan pegiat literasi** yang berkontribusi dalam penguatan literasi masyarakat, mendirikan pojok baca/ taman bacaan masyarakat, Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan desa/kelurahan melalui KKN. Mitra Perpustakaan Provinsi lainnya adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel diantaranya TP PKK Provinsi Sumsel, Bappeda Provinsi Sumsel, Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Badan PTSP, Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel, Dinas Koperasi Provinsi Sumsel, Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumsel serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam hal Pendirian Pojok Baca Desa/Kelurahan Binaan PKK, Penganggaran Urusan Perpustakaan, Jaringan Internet guna mempermudah akses informasi, Pengembangan Perpustakaan

Sekolah, Akreditasi, Peningkatan Kompetensi Pengelola Perpustakaan Sekolah. Pendirian Pojok Baca Publik dan Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

2.1.6 Dukungan BUMD dan SWASTA serta Instansi Vertikal dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Terhadap Dukungan BUMD dalam rangka pencapaian kinerja bidang perpustakaan telah dilakukan dengan membangun kolaborasi dan kerjasama bersama BUMD/BUMN yang ada di wilayah Provinsi Sumsel dengan Bank Indonesia, PT. Angkasa Pura, Bank Sumsel Babel, Otoritas Jasa Keuangan, LRT dalam hal Penyelenggaraan Berbagai Event Pembudayaan Kegemaran Membaca (Festival Literasi), Sosialisasi/Roadshow (Literasi Finansial) serta Pendirian Pojok Baca. Selain itu kerjasama dengan berbagai pihak swasta seperti GRAB Palembang, OPI Mall, GERKATIN, Small Business Sumsel, Burger King, Nutri Food dan Pt Farma dalam hal Sosialisasi Bahasa Isyarat, Pelatihan Bahasa Isyarat (Kelas Asik), penyelenggaraan berbagai Jenis lomba serta dukungan terhadap kegiatan literasi. Instansi vertikal lainnya adalah Kantor Imigrasi Palembang, Polda

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Saat ini Kerjasama Daerah dalam urusan perpustakaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel terkait dengan Budaya Literasi di Sumsel masih terbatas pada beberapa kerjasama dengan instansi vertikal diantaranya Kantor Imigrasi, Polda Sumsel.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Rancangan Awal RPJMD dan laporan KLHS RPJMD 2025-2029 berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tersedianya akses pendidikan berkualitas dimana perpustakaan berperan sebagai pusat sumber daya intelektual untuk mencapai tujuan, selain itu perpustakaan juga menyediakan fasilitas belajar yang nyaman dan memfasilitasi program literasi untuk meningkatkan keterampilan

membaca dan menulis terutama di wilayah yang kurang akses terhadap pendidikan formal. Berbagai permasalahan dan kendala dihadapi di dalam menjalankan tugas dan fungsi. Saat ini kondisi indeks literasi masyarakat sumsel dalam kategori sedang, dimana jumlah perpustakaan belum merata di seluruh kelembagaan yang ada, di tambah dengan sarana dan prasarananya termasuk gedung dan lokasi, Gedung Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan jauh dari sebuah gedung yang representatif sebagaimana yang diharapkan, kondisi gedung yang berumur tua diperparah dengan kerusakan hampir pada seluruh ruangan dan terlihat tidak menarik. Kondisi ini berbeda jauh dengan standar dari sebuah perpustakaan yang hendaklah menarik dari segi arsitektur dan mudah dijangkau. Penggunaan warna juga bisa merupakan daya tarik yang akan membangkitkan minat baca pengguna. Selain itu sarana dan prasarana pendukung layanan perpustakaan hendaklah didukung oleh Teknologi Informasi (TI) yang akan sangat membantu perpustakaan memperbaiki kualitas dan jenis layanan. Keberadaan Gedung tidak langsung dapat dilihat oleh masyarakat di karenakan pada bagian depan halaman gedung perpustakaan telah berdiri ruko - ruko yang menempati jalur hijau. Melihat kondisi gedung saat ini sangat tidak representative dikarenakan Gedung yang telah berumur lebih dari 35 tahun. Kondisi ini sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel kepada masyarakat yang menghendaki agar mengedepankan kenyamanan pemustaka. Berbagai permasalahan atau kondisi masih kami hadapi dan menjadi kendala dalam memenuhi kepuasan para pemustaka terhadap pelayanan yang kami berikan. Berbagai permasalahan tersebut telah kami identifikasi yaitu :

1. Kurangnya kebutuhan dalam memperoleh informasi/bahan bacaan yang dibutuhkan, dikarenakan keberadaan koleksi perpustakaan yang belum merata dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat dan keberagaman koleksi yang sangat terbatas jumlahnya khususnya untuk koleksi anak, koleksi difabel, koleksi muatan lokal dan koleksi nusantara, kurangnya kebutuhan masyarakat akan informasi serta ketidaktertarikan terhadap topik bahan bacaan yang tersedia, menurut IFLA jumlah koleksi perpustakaan adalah dua kali populasi penduduk

2. Sebaran jumlah perpustakaan yang tidak merata dikarenakan faktor geografis
3. Terbatasnya sarana prasarana berbasis teknologi informasi komunikasi baik yang dimiliki oleh perpustakaan maupun pemustaka, kapasitas internet yang masih kecil, terbatasnya akses informasi terhadap bahan bacaan melalui internet secara free serta beberapa desa/kelurahan dalam kondisi blank spot. Kondisi beberapa Gedung perpustakaan juga tidak representative.
4. Pelayanan perpustakaan yang belum memenuhi ketentuan diantaranya jam buku operasional yang masih kurang terutama pada perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan dan taman bacaan masyarakat, jumlah anggota perpustakaan yang minim, jumlah buku yang dipinjam masih sedikit, dan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih minim (kurang dari 2% dari jumlah penduduk)
5. Tenaga perpustakaan, khususnya Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan umumnya tenaga sukarela dengan indentif yang minim sehingga mereka yang sudah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan seringkali berpindah tempat bekerja mencari penghasilan yang lebih layak.
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang belum maksimal dimana masih terdapat perpustakaan dengan type C dengan alokasi anggaran yang minim dan jumlah perpustakaan yang dibina masih sangat terbatas.
7. Minimnya perpustakaan yang terkelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan belum terakreditasi. Kondisi ini dikarenakan program pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca belum berjalan secara optimal
8. Tingkat kemanfaatan perpustakaan masih sangat minim, hal ini sangat dipengaruhi oleh gedung yang representative serta sarana prasarana perpustakaan yang memadai

2.2.2 Isu Strategis

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI, dimana Dinas Perpustakaan Provinsi

Sumsel melalui Rencana Strategis mengidentifikasi isu-isu strategis secara nasional dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan berdampak/ mempengaruhi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun isu regional di bidang Pendidikan adalah kualitas SDM dan keluarga masih rendah. Sementara isu global menyatakan bahwa hasil PISA 2022 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia masih menghadapi tantangan, sementara isu nasional lebih mengarah kepada keterbatasan sumber pengetahuan, tenaga perpustakaan, keterbatasan ruang penyimpanan, keterbatasan wewenang dan minimnya perhatian pemerintah terhadap perpustakaan serta kondisi geografis dan infrastruktur.

Berdasarkan hasil kajian/penelitian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI terhadap Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dimana skor TGM dan skor IPLM secara nasional masih pada kategori sedang serta naskah kuno yang semakin rapuh, rusak serta musnah. Ketiga hal ini menjadi isu strategis di tingkat nasional dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan.

Secara regional kondisi ini juga dialami oleh Provinsi Sumsel, dimana berdasarkan hasil kajian/penelitian skor untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masih pada kategori sedang dan berada di bawah rata-rata nasional serta Peran Masyarakat dalam Perawatan dan Pelestarian Naskah Kuno masih sangat rendah sehingga Naskah Kuno dalam kondisi rusak dan musnah. Oleh karena itu isu-isu strategis dirumuskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumsel dalam kategori sedang dan masih berada di bawah rata-rata nasional.

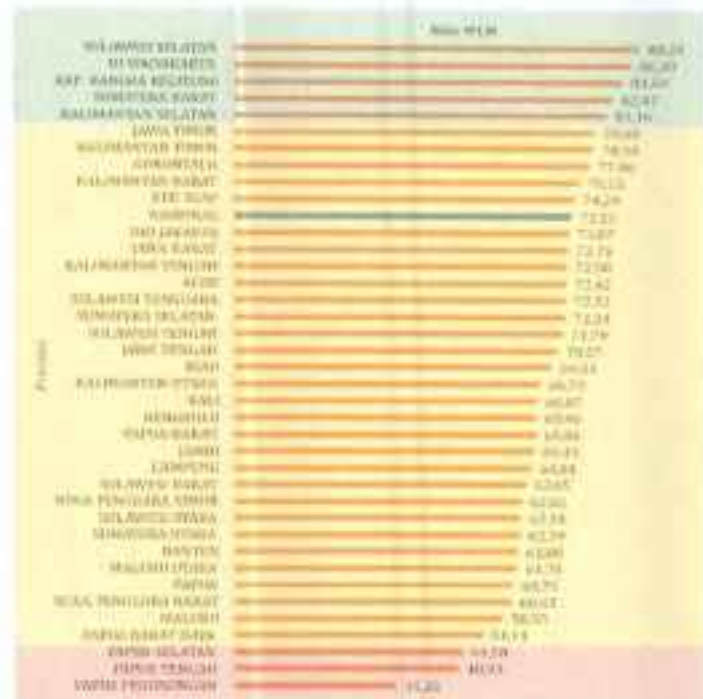
Tahun 2024 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai 15,18 indeks, mengalami kenaikan 0,76 point dari Tahun 2023 yang mencapai 14,42 indeks, Secara rata-rata nasional ditetapkan sebesar 15,45 indeks dengan beberapa unsur pembangun yang masih memiliki skor rendah yaitu :

- a. Jumlah Perpustakaan yang belum merata di Provinsi Sumsel, dimana rasio ketersediaan perpustakaan umum

0,000078 (artinya, terdapat 8 perpustakaan per 100.000 ribu penduduk) rasio ketersediaan perpustakaan sekolah 0,00255 artinya terdapat 255 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah, Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan Tinggi 0,00059 (artinya terdapat 59 perpustakaan per 100.000 civitas akademik) Selanjutnya Sumsel kekurangan 6.902 perpustakaan.

- b. Tingkat ketercukupan koleksi perpustakaan masih rendah dan belum memenuhi standar dan tingkat pemanfaatan koleksi oleh pemustaka masih rendah. Dimana rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, untuk Sumsel satu koleksi dapat diakses oleh 2 orang penduduk. Sementara jumlah koleksi yang terdata 7.320.232 judul, dan Sumsel masih kekurangan 10.166.812 judul koleksi. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO dihitung dengan rumusan jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk.
- c. Tenaga Perpustakaan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Rasio ketercukupan Tenaga Perpustakaan di Sumsel mencapai 1 : 2.715 artinya 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.715 penduduk. Saat ini Jumlah tenaga perpustakaan telah memenuhi standar dan perlu terus dipertahankan. Ketentuan yang dikeluarkan oleh IFLA/UNESCO adalah 1 : 2.500 artinya 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.500 penduduk. Sumsel kekurangan tenaga perpustakaan 277 orang.
- d. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari masih rendah. Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari dengan membandingkan antara jumlah kunjungan masyarakat perhari dengan jumlah penduduk Sumsel. Untuk Sumsel baru mencapai 0,53% dikatakan belum ideal dimana berdasarkan IFLA standar tingkat kunjungan perpustakaan adalah 2% dari total penduduk. Kekurangan kunjungan sebanyak 128.646 orang.

- e. Persentase perpustakaan yang dibina sesuai standar mencapai 51,07% artinya masih terdapat 48,93% yang belum memenuhi standar.



Grafik 16 IPLM Per Provinsi

2. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Sumsel

Tahun 2024 mencapai **69,62 skala nilai** atau naik sebesar 5,47 point dari capaian Tahun 2023 sebesar **64,15 skala nilai** dalam kategori sedang, namun masih berada di bawah rata rata nasional yang mencapai **72,44 skala nilai**. Beberapa indikator yang mempengaruhinya :

- a) Frekwensi Membaca dengan nilai 73,88 (jumlah aktivitas membaca yang dilakukan per minggu) oleh masyarakat Sumsel berkisar 5 - 6 kali/minggu (rata-rata frekwensi membaca masyarakat Indonesia 5 - 6 kali per minggu) paling rendah pada kelompok pelajar.
- b) Durasi Membaca dengan nilai 63,29 (jumlah waktu membaca yang dilakukan per hari) oleh masyarakat Sumsel berkisar 1 jam 59 menit/hari. UNESCO menetapkan standar membaca buku dilakukan minimal 4-6 jam per hari, sementara rata-rata durasi membaca masyarakat Indonesia 1 jam 59 menit per hari. Paling rendah pada kelompok pelajar
- c) Jumlah buku dibaca dengan nilai 71,36 (jumlah buku yang bisa ditamatkan dalam jangka waktu 3 bulan,

dimana masyarakat Sumsel minimal 5-6 bahan bacaan per triwulan. (rata-rata masyarakat Indonesia 5 s.d 6 bahan bacaan per tiga bulan)

Tabel 2.22

Permasalahan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Permasalahan	Faktor-Faktor yang mempengaruhi
Ratio ketersediaan perpustakaan terhadap jumlah penduduk masih belum merata	• Terbatasnya jumlah dan sebaran berbagai jenis perpustakaan • Dukungan regulasi kepala daerah yang belum berpihak kepada keberadaan perpustakaan • Implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 23 ayat 6 belum berjalan secara maksimal • Geografis
Ratio ketercukupan koleksi belum memenuhi Standar	• Minimnya ketersediaan bahan bacaan baik tercetak maupun digital di berbagai jenis perpustakaan • Jumlah koleksi/judul buku yang tersedia di perpustakaan sangat terbatas • Disparitas penyebaran bahan bacaan belum merata antar daerah di kabupaten/kota • Dukungan Sarana TIK dan Internet belum tersedia secara merata di Provinsi Sumsel • Sarana akses informasi masih terbatas keberadaannya • Menurut IFLA/UNESCO jumlah koleksi yang tersedia di provinsi memenuhi 2 kali jumlah penduduk sumsel (sumsel mengalami kekurangan koleksi sebanyak 15.188.712)
Ratio ketercukupan tenaga perpustakaan di Sumsel belum mencukupi	• Terbatasnya jumlah dan sebaran tenaga perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan • Tenaga teknis pengelola

	perpustakaan belum menempati posisi yang prioritas • Lamanya pendidikan dan pelatihan menjadi tenaga fungsional pustakawan • Minimnya minat ASN menjadi Fungsional Pustakawan • Tidak tersedianya formasi penerimaan ASN untuk fungsional pustakawan
Ratio jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan	• Diversifikasi layanan perpustakaan sangat terbatas • Alokasi biaya publikasi melalui pemanfaatan berbagai media sangat minim • Terbatasnya jenis dan subjek koleksi yang tersedia di perpustakaan • Terbatasnya sarana prasarana berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
Persentase perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional	• Terbatasnya sumber daya perpustakaan • Terbatasnya SDM/fungsional pustakawan • Belum terkelolanya perpustakaan sesuai SNP • Tidak adanya dana anggaran khusus untuk operasional perpustakaan • Kualitas pembinaan masih perlu ditingkatkan • Minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan • Sosialisasi SNP belum berjalan secara maksimal

Setelah permasalahan teridentifikasi selanjutnya perlu memperhitungkan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan kunci keberhasilan dalam mengembangkan suatu rencana strategis dengan mengkomunikasikan dan menerapkannya dalam wujud potensi/peluang (opportunities), kekuatan (strengths), tantangan/kendala (threats) dan kelemahan (weaknesses).

Analisis data SWOT yang merupakan serangkaian proses analisis berhubungan dengan penentuan alternatif strategi guna melakukan manajemen perubahan untuk mencapai suatu strategi yang mempunyai keunggulan kompetitif. Beberapa alternatif strategi dari hasil perhitungan dan analisis data SWOT sebagai berikut:

SWOT juga dijadikan sebagai landasan dan pertimbangan untuk mempersiapkan, menata dan melakukan tindakan yang lebih tepat sehingga penyelenggaraan perpustakaan dapat memenuhi keinginan dan permintaan pemakai. Analisis SWOT ini dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi perpustakaan, sehingga perlu dikaji apa yang menjadi kelemahan dan bagaimana mengatasi, memanfaatkan peluang yang dimiliki, apakah perpustakaan menghadapi tantangan/ ancaman dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Setelah mengetahui dengan pasti terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan maka stakeholder di perpustakaan dapat melakukan langkah-langkah atau tindakan yang tepat.

3) Analisa Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.

3.1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan Lingkungan Internal

Dari identifikasi dan perhitungan faktor - faktor internal SWOT permasalahan diperoleh beberapa faktor kekuatan (S) yaitu :

- (1) Adanya dukungan regulasi penguatan kelembagaan dan Penguatan Literasi di Tingkat Provinsi
- (2) Nomenklatur Dinas Perpustakaan Provinsi dalam urusan pemerintahan menyyclenggarakan satu urusan.
- (3) Perpustakaan terakreditasi A
- (4) Dukungan Sumber Daya Manusia baik pustakawan maupun Tenaga teknis perpustakaan cukup memadai
- (5) Keberadaan perpustakaan sangat banyak dan tersebar di 17 kabupaten/kota.
- (6) Penguatan terhadap program program pembinaan.

3.2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan Lingkungan Eksternal

Kelemahan (weakness) perpustakaan adalah suatu kondisi sebuah perpustakaan tidak atau kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan adanya kelemahan tersebut kemungkinan terdapat hambatan atau kendala yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja perpustakaan. Kelemahan eksternal biasanya berkaitan dengan regulasi, sumber daya perpustakaan dan anggaran

- (1) Implementasi regulasi di bidang Perpustakaan di tingkat kabupaten/kota belum berjalan secara optimal (UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 23 ayat 6 UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Serah Simpan KCKR.
- (2) Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi di berbagai jenis perpustakaan.
- (3) Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi yang tidak representative dan beberapa Kabupaten/Kota belum memiliki gedung perpustakaan diantaranya Kab. OKU, Kab. OKUS.
- (4) Peningkatan kapasitas tenaga fungsional perpustakaan masih belum optimal
- (5) Pemerataan kegiatan pembinaan perpustakaan secara umum belum merata.
- (6) Pengembangan koleksi setiap tahunnya belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan
- (7) Terbatasnya variability layanan di Perpustakaan Umum
- (8) Minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan berbagai jenis perpustakaan.
- (9) Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan.

3.3 Identifikasi Peluang dan Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang adalah kesempatan yang dimiliki oleh Perpustakaan dengan memanfaatkan kekuatan atau

potensi yang ada untuk mengatasi berbagai kelemahan yang mengancam instansi. Untuk itu Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel harus dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan dan memajukan perpustakaan.

- (1) Regulasi yang bersifat perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh stakeholders di lingkungan perpustakaan,
- (2) Dukungan Pemerintah Provinsi kepada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel.
- (3) Perkembangan Informasi dan ilmu pengetahuan.
- (4) Potensi demografi penduduk sumsel sebagai populasi perpustakaan
- (5) Jumlah berbagai jenis perpustakaan yang tersebar di Kabupaten/Kota.
- (6) Berkurangnya jumlah pustakawan
- (7) Komunitas pegiat gemar baca dan literasi mulai bersinergi secara positif dengan dinas perpustakaan dalam berbagai kegiatan

3.4 Identifikasi Faktor Tantangan

Tantangan merupakan ancaman atau hambatan yang menghalangi kita dalam berusaha atau melakukan sesuatu. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah

- (1) Ketersediaan dan pemerataan akses bahan bacaan bermutu.
- (2) Integrasi Sistem Layanan Perpustakaan Digital
- (3) Penguatan Literasi Masyarakat
- (4) Peningkatan akreditasi semua jenis perpustakaan
- (5) Peningkatan formasi dan kompetensi tenaga perpustakaan
- (6) Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
- (7) Perkembangan era digital yang makin tidak terbendung
- (8) Seluruh kegiatan perpustakaan berbasis mobile friendly (mengoptimalkan aplikasi yang nyaman bagi penggunaanya dengan tetap menyediakan konten yang mendidik.

Adapun potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan adalah jumlah penduduk dengan usia potensial 5 s.d 65 tahun yang cukup besar dimiliki oleh Provinsi sumsel yang menjadi populasi perpustakaan sebagai pengguna.

Tabel 2.23

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Populasi Perpustakaan yang cukup besar, penduduk usia 5 – 65 tahun	Jumlah Perpustakaan yang belum merata di Provinsi Sumsel Tingkat ketercukupan koleksi perpustakaan dan pemanfaatan koleksi oleh pemustaka masih rendah Tenaga Perpustakaan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat (1 org pustakawan	Gedung perpustakaan yang representative dengan lokasi yang strategis belum dimiliki oleh semua Dinas Perpustakaan di 17 Kab/Kota Lingkungan Fisik Perpustakaan Perpustakaan harus mampu meningkatkan lingkungan fisik agar lebih nyaman dan menarik bagi pengunjung, Perubahan Teknologi dapat mempengaruhi desain ruangan		Digitalisasi dan Teknologi Perpustakaan harus beradaptasi dengan teknologi dan media sosial untuk tetap relevan dengan masyarakat, termasuk menyediakan akses ke sumber daya digital, mengembangkan layanan online dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan perpustakaan, melestarikan koleksi digital dan meningkatkan layanan keanggotaan Perubahan Masyarakat	Keterbatasan Sumber Daya Perpustakaan menghadapi keterbatasan sumber daya seperti anggaran, SDM dan berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan mencari dukungan dari berbagai pihak dan bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan dan menjangkau lebih banyak masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masih dalam kategori sedang dan berada di bawah rata rata nasional

Keberadaan perpustakaan yang cukup banyak dan tersebar di 17Kab/Kota	melayani 2.500 masyarakat Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari masih rendah (kurang dari 2%) Persentase Kperpustakaan yang dibina sesuai standar mencapai 51,07% artinya masih terdapat 48,93% yang belum memenuhi standar.	perpustakaan termasuk penggunaan ruang yang fleksibel, area kerja yang kolaboratif dan penggunaan teknologi, Perpustakaan perlu juga mempertimbangkan bagaimana dapat lebih ramah lingkungan seperti dengan penggunaan energi dan pengurangan limbah	dan Preferensi Informasi Perpustakaan perlu memahami perubahan dalam preferensi informasi masyarakat termasuk tren membaca digital, merancang koleksi, layanan dan program yang relevan bagi masyarakat dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang beragam Kebutuhan Informasi yang terus berkembang Ketersediaan informasi yang terus meningkat membuat perpustakaan perlu memfilter informasi untuk itu diperlukan tim yang kompeten di dalam mengelola informasi dan perpustakaan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf untuk dalam menghadapi dunia informasi. Informasi dan Komunikasi, Kebutuhan Informasi yang terus berkembang		
---	---	---	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dinas Perpustakaan Provinsi adalah instansi teknis yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam urusan perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berperan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam merupakan landasan hukum yang menaungi pelaksanaan tugas pokok fungsi perpustakaan di masyarakat sesuai dengan kewenangannya, maka penentuan tujuan ditetapkan di dasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya

Mengacu pada NSPK maka penetapan tujuan Perangkat Daerah tetap memperhitungkan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan faktor kunci keberhasilan dalam mengembangkan suatu rencana strategis dengan memperhatikan potensi/peluang (opportunities), kekuatan (strengths), tantangan/kendala (threats) dan kelemahan (weaknesses) yang dihadapi oleh suatu instansi.

Setelah semua kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat diidentifikasi serta strategi yang akan dijalankan, selanjutnya menetapkan tujuan. Tujuan itu sendiri harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan merupakan hasil akhir yang dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan secara kuantitatif atau terukur.

Penentuan tujuan dan sasaran harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel

Tahun 2025 s.d 2029 serta pencapaian target – target sasaran bidang perpustakaan yang terukur, dalam suatu indikator kinerja.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita, dimana integrasi urusan perpustakaan dengan RPJMN pada Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas serta Prioritas Nasional 8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Selanjutnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang di susun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2029 dengan Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2025-2029 adalah “ **Sumsel Maju Terus Untuk Semua**” dengan 7 Misi Pengusung, dimana 2 (dua) misi diantaranya, mengambil perannya untuk mewujudkan Misi sebagaimana tergambar pada table di bawah ini :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Pemerintah Prov. Sumsel
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2025-2029

Misi I	Tujuan	Sasaran 4
Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM
Misi 7	Tujuan	Sasaran 3
Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan local	Terwujudnya Stabilitas Sosial	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Maka untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sumsel, dalam rangka meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan budaya literasi di masyarakat maka ditetapkanlah *tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-*

2029 adalah “ *Terwujudnya Budaya Literasi Menuju Sumsel Cerdas*”

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Setelah tujuan Perangkat Daerah ditetapkan untuk Tahun 2025-2029, maka selanjutnya perlu dilakukan penetapan sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** dengan indikator (1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan indikator (2) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) yang menjadi Indikator di dalam RPJMD. Selanjutnya guna mendukung tugas pokok fungsi bidang pelestarian, maka **Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel di dalam Rencana Strategis menetapkan sasaran tambahan** yaitu (1) Meningkatkan kemanfaatan naskah kuno dengan indikator persentase pengunjung yang memanfaatkan naskah kuno (2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dengan indikator Nilai Hasil Evaluasi Inspektorat. Kedua sasaran strategis tambahan tersebut akan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sasaran tersebut di atas mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang sehat dan cerdas diantaranya melalui :

- a. Penyediaan bahan bacaan yang bermutu, murah dan mudah diakses baik konvensional maupun digital oleh pemustaka dan masyarakat umum lainnya serta pemanfaatan bahan bacaan di perpustakaan sekolah dalam rangka pelaksanaan ekstrakurikuler sekolah serta lingkungan kampus dengan menjadikan perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai pusat kegiatan kemahasiswaan, kegiatan - kegiatan sosial yang memberdayakan masyarakat serta literasi hasil penelitian.
- b. Membudayakan Gerakan Sumsel Cerdas melalui budaya Literasi disejumlah daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan sehingga memacu menumbuhkan budaya literasi serta mengoptimalkan kampanye minat dan budaya

baca masyarakat dengan memanfaatkan media informasi baik cetak maupun elektronik.

- c. Mewujudkan perpustakaan memenuhi standar dan memfasilitasi pendirian perpustakaan, pojok baca, taman baca di area area public.

3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan

Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan kewenangan daerah dan kekuatan hukum yang mengatur urusan perpustakaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 23 ayat 1 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan harus memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Hal ini diperkuat dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi mencakup :

- 1) Standar koleksi perpustakaan;
- 2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- 3) Standar pelayanan perpustakaan;
- 4) Standar tenaga perpustakaan;
- 5) Standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
- 6) Standar pengelolaan perpustakaan.

Selain itu kewenangan daerah juga di atur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standarisasi Pengelolaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno. Secara rinci NSPK tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai berikut :

- 1) Standar koleksi perpustakaan;
 - a. Perpustakaan Provinsi tipe C jumlah minimal koleksi 50.000 judul
 - b. Perpustakaan Provinsi tipe B jumlah minimal koleksi 60.000 judul

- c. Perpustakaan Provinsi tipe A jumlah minimal koleksi 70.000 judul

Sementara Jumlah penambahan koleksi per tahun yaitu $(0,01 \times \text{jumlah penduduk})$ per tahun dan dan koleksi terbaru 3 tahun terakhir paling sedikit 5% dari total koleksi pada tahun berjalan.

2). Jenis koleksi perpustakaan Provinsi dan Kab/Kota terdiri dari karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya dalam bentuk elektronik, dengan persyaratan standar koleksi sebagai berikut:

- a. Koleksi Perpustakaan Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah daerah tersebut untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
- b. Perpustakaan memiliki jenis koleksi referensi, koleksi umum (koleksi disirkulasikan), koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus (muatan lokal), koleksi langka, dan jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- c. Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus, seperti kebutuhan penyandang cacat.
- d. Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.
- e. Pengembangan koleksi perpustakaan mengacu pada kebijakan pengembangan koleksi sebagai pedoman tertulis yang ditandatangani kepala perpustakaan dan harus ditinjau paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali.
- f. Perpustakaan melakukan cacah ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun. Perpustakaan Provinsi dan perpustakaan kab/kota mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perpustakaan per tahun untuk pengadaan bahan koleksi perpustakaan sebesar :

- g. Perpustakaan Provinsi paling sedikit Rp.1.000 per jumlah penduduk per tahun. Perpustakaan Kab/Kota paling sedikit Rp.2.500 per jumlah penduduk pertahun.

2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan Provinsi

Lokasi/lahan perpustakaan Provinsi dan Kab/Kota harus berada di lokasi strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan kepemilikannya oleh pemerintah daerah dengan hukum yang jelas.

- a) Gedung perpustakaan Provinsi memiliki luas paling sedikit 3.000 m² yang permanen dan bisa dikembangkan, dibangun dengan standar konstruksi, teknologi, lingkungan, kesehatan, keselamatan berestetika, efektif dan efisien.
- b) Gedung perpustakaan Kab/Kota memiliki luas minimal (0,008 m² x jumlah penduduk) yang permanen dan bisa dikembangkan, dibangun dengan standar konstruksi, teknologi, lingkungan, kesehatan, keselamatan berestetika, efektif dan efisien. Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, area baca dan ruang staff yang ditata berestetika, efektif dan efisien.

3) Standar pelayanan perpustakaan

- a. Jenis pelayanan, pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka
- b. Jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari
- c. Kerjasama perpustakaan dengan perpustakaan lain dan dengan instansi lain untuk mengoptimalkan pelayanan.
- d. Keanggotaan Perpustakaan paling sedikit 2 % x jumlah penduduk
- e. Kunjungan Perpustakaan paling sedikit 0,10 x jumlah penduduk per tahun
- f. Sirkulasi (peminjaman) paling sedikit 0,125 x jumlah penduduk per tahun

- g. Kepuasan Pemustaka, melakukan survei kepuasan paling sedikit 1 kali per tahun dengan tingkat kepuasan : 60% pemustaka menyatakan PUAS

4) Standar tenaga perpustakaan

- a) Jumlah tenaga perpustakaan paling sedikit $1/25.000 \times$ jumlah penduduk
- b) Kualifikasi kepala perpustakaan berasal dari pustakawan atau tenaga ahli bidang perpustakaan
- c) Kualifikasi pustakawan berkualifikasi akademik minimal Diploma II bidang perpustakaan
- d) Jumlah pustakawan paling sedikit $1/75.000 \times$ jumlah penduduk
- e) Kualifikasi tenaga teknis terdiri dari tenaga komputer, tenaga tata usaha dan tenaga teknis lainnya yang menunjang pelaksanaan fungsi perpustakaan.

5) Standar penyelenggaraan perpustakaan

- a) Penyelenggaraan perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota mengacu pada sistem nasional perpustakaan
- b) Struktur organisasi perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah
- c) Standar pengelolaan perpustakaan
- d) Perencanaan, meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.

6) Pelaksanaan, menerapkan sistem manajemen berbasis mutu

7) Pengawasan, dilakukan melalui supervisi, evaluasi dan pelaporan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan masyarakat

- 8) Pelaporan, dilakukan secara berkala dengan mengacu pada tugas dan fungsi perpustakaan.
- 9) Anggaran, penyusunan anggaran mengacu pada rencana rencana strategis, rencana kerja/ program kerja perpustakaan. Anggaran perpustakaan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan sumber lain yang tidak mengikat.

Selanjutnya di Tahun Anggaran 2022, Perpustakaan Nasional RI telah menyusun Norma, Standar, Prosedure dan Kriteria untuk Perpustakaan Sekolah Menengah Atas dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan Nasional juga menetapkan petunjuk teknis untuk Perpustakaan Sekolah, dimana NSPK yang disusun terkait dengan organisasi perpustakaan, sumber daya manusia, koleksi serta cara bagaimana mendayagunakan perpustakaan sekolah/madrasah untuk mendukung proses belajar mengajar.

Penetapan NSPK ini menjadi pedoman/acuan bagi Perpustakaan Sekolah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penyusunannya bertujuan memberikan acuan bagi masyarakat untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah dapat berlangsung secara benar, sistematis dan berkelanjutan. NSPK yang ditetapkan meliputi :

I. Koleksi Perpustakaan

- Karya Cetak (buku teks, buku penunjang kurikulum, bahan bacaan dan buku referensi)
- Terbitan Berkala (majalah, surat kabar)
- Audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik.

a. Jumlah koleksi

Menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. Buku pengayaan dengan perbandingan 60% nonfiksi dan 40% fiksi

- b. Perpustakaan menambah koleksi per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah koleksi semakin kecil persentase penambahan koleksinya (1000 judul

penambahan sebanyak 10%, 1.500 judul penambahan sebanyak 8%, 2000 judul penambahan sebanyak 6%.

- c. Perpustakaan melanggan paling sedikit 3 (tiga) judul majalah dan 3 (tiga) judul surat kabar.

II. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

a. Gedung/ruang

Luas gedung perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit $0,4 \text{ m}^2$ x jumlah siswa dengan ketentuan bila 3 s.d 6 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 72 m^2 , 7 sd. 12 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 144 m^2 , 13 s.d 18 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 216 m^2 , 19 s.d 27 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 288 m^2 .

b. Sarana

Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan untuk menjamin kelangsungan fungsi perpustakaan seperti perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multi media dan perlengkapan lainnya.

III. Pelayanan Perpustakaan

Jam Pelayanan, dimana perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 8 (delapan) jam per hari kerja.

IV. Tenaga Perpustakaan

Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan paling sedikit 1 (satu) orang (d disesuaikan dengan rombongan belajar)

V. Anggaran

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% dari total anggaran sekolah/madrasah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan dan perawatan gedung.

4. Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

Sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dimana Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan turut berkontribusi untuk mewujudkan sasaran ke 1 pada Misi 1 yaitu meningkatinya kualitas pendidikan dan keterampilan SDM dan Sasaran ke 20 pada Misi ke yaitu meningkatinya pembangunan kebudayaan. Selanjutnya berdasarkan tugas pokok fungsi, maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 1) Meningkatnya Indeks Pembangunan. Berikut tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah tertuang di dalam tabel 3.2 dan tabel 3.3. ;

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tingkat Kegemaran Membaca Sasaran RPJMD Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM	Terwujudnya Budaya Literasi Menuju Sumsel Cerdas	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	72,24	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	Angka konversi
				15,18 indeks	15,33	15,44	15,54	15,65	15,75	15,86	
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	69,62 Nilai	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno Sasaran RPJM Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya Budaya Literasi Menuju Sumsel Cerdas	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno	Persentase Pengunjung yang memanfaatkan naskah kuno	5%	7	9	12	13	14	15	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Terwujudnya Budaya Literasi Menuju Sumsel Cerdas	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat	81,26	80,29	82,00	84,00	85,00	87,00	88,00	

5. Strategi Rencana Strategis (Renstra) dan Arah Kebijakan

Setelah dirumuskan dan ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada bab sebelumnya, strategi menjadi langkah yang diharapkan mampu mengarahkan sasaran perangkat daerah melalui arah kebijakan menjadi dasar di dalam pelaksanaan. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan periode ini merupakan kelanjutan dari strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode sebelumnya. Strategis adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya, tahapan, fokus penentuan program/kegiatan/sub kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan perpustakaan merupakan tuntutan pelaksanaan pembangunan di bidang perpustakaan dalam kurun waktu 2025-2029 merupakan pencapaian atas Visi, Misi Gubernur Sumatera Selatan Terpilih.

Terdapat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi, Misi RPJMD periode 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengarah kepada Peningkatan Akses terhadap Fasilitas Literasi, Peningkatan Budaya Literasi dan Peningkatan SDM Literasi. Oleh karena itu pencapaian sasaran dengan strategi yang dilakukan perlu direncanakan penahapannya untuk lima tahun kedepan dimulai dari Tahun 2026-2030.

Berikut rumusan pernyataan strategi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2026-2029 yaitu sebagaimana tergambar pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Membangun Database Perpustakaan • Memperkuat unsur pembangun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca. • Pendataan Naskah Kuno di Sumsel • Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran ke berbagai komponen masyarakat	• Pembinaan telah menyentuh di berbagai jenis perpustakaan • Penyebaran Perpustakaan / Pojok Baca telah mencapai 50% • 60% Perpustakaan terkelola sesuai SNP • Ketercukupan koleksi baik digital maupun konvensional di berbagai jenis perpustakaan • 50% tenaga perpustakaan telah mengikuti diklat kompetensi • Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca telah menyentuh sampai ke tingkat desa/kelurahan	• Penyebaran pojok baca/perpustakaan telah merata (1 desa, 1 perpustakaan) • 75% Perpustakaan terkelola sesuai SNP • Seluruh Naskah Kuno telah dialihmediakan / digitalisasi • Terbangunnya interkoneksi data koleksi antar berbagai jenis perpustakaan • Sarana akses informasi berada di ruang ruang publik • Seluruh kegiatan perpustakaan berbasis mobile friendly	• Seluruh jenis perpustakaan telah terkelola sesuai SNP • Digitalisasi Naskah Kuno dapat diakses oleh masyarakat • Pengadaan Bus Layanan digital • Skor IPLM Kategori Tinggi • Skor TGM Kategori Tinggi • Seluruh tenaga perpustakaan telah memiliki kompetensi • Koleksi Digital dapat diakses oleh masyarakat desa/kelurahan	• Terwujudnya Sumsel Cerdas • Perpustakaan menjadi Icon Sumsel (sebagai tempat rekreasi)

Penyajian lokus dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera selatan Tahun 2025-2029 mencakup 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumsel dengan tetap mempedomani apa yang menjadi kewenangan daerah baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota. Lokus Renstra nantinya akan difokuskan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel,

namun terdapat beberapa kegiatan yang wilayah pengembangannya berada di Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan, khusus untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Lokus Renstra lebih difokuskan ke dalam dan luar Provinsi.

6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja merupakan operasionalisasi dari Norma Standar Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran resntra. Berikut tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
	Undang Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan	Melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan	- Meningkatkan keberagaman judul dan kualitas bahan bacaan - Menyediakan fasilitas perpustakaan yang memadai - Meningkatkan kompetensi Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah - Meningkatkan system informasi berbasis digital (akses online, penelusuran buku, peminjaman dan pengembalian. - Melibatkan warga sekolah dan partisipasi siswa dalam kegiatan perpustakaan dan program program literasi sekolah. - Menambah jam buka layanan perpustakaan sekolah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
		Meningkatkan akses program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan (2027)	- Ketercukupan Layanan Perpustakaan - Meningkatkan ketersediaan pojok baca digital di ruang publik - Meningkatkan sarana akses informasi bahan bacaan berbasis TIK di ruang publik dan internet secara free - Meningkatkan Bahan Bacaan yang berkualitas dengan keberagaman judul dan topik yang menarik baik konvensional maupun e - book. - Meningkatkan rata rata kecepatan layanan perpustakaan	
		Mendorong Pemantapan Program Literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan (2028)	- Meningkatkan kegiatan literasi dan pelibatan siswa dalam pembudayaan kegemaran membaca melalui penyelenggaraan berbagai lomba di sekolah - Meningkatkan Peran Duta Baca Sekolah - Meningkatkan Ketersediaan Bahan Bacaan yang bermutu dgn topik yang menarik - Menciptakan Ruang Perpustakaan yang Representative dan nyaman - Meningkatkan akses kemudahan akses informasi bagi pelajar	
			- Meningkatkan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dengan topik yang menarik - Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
			• Meningkatkan akses informasi bahan bacaan di ruang publik • Diversifikasi Layanan Perpustakaan • Kampanye gerakan gemar membaca melalui media cetak/media sosial • Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan • Meningkatkan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat	
		• Optimalisasi keberlanjutan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan	• Pendidikan dan Pelatihan - Mengikuti program sertifikasi pustakawan - Mengikuti diklat dan pelatihan teknis kepustakawanan • Pengembangan Profesional - Meningkatkan kinerja secara berkesinambungan - Membangun jejaring pustakawan secara nasional - Berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan diri dan organisasi profesi • Inovasi dan Kreativitas • Menguasai Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi	
		• Mewujudkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan yang	• Pendataan dan Pemetaan • Sarana Prasarana Pelestarian Naskah Kuno • Pembinaan Pelestarian Naskah Kuno (Penyelamatan Fisik	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
		terintegrasi	dan Isi manuskrip • Percepatan digitalisasi/alihmedia • Peningkatan mutu tenaga pelestarian dan alih aksara serta alih bahasa • Penguatan Kapasitas Peneliti/filolog/pustakawan • Pemanfaatan Media Publikasi	
			• Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno (seminar, lokakarya, workshop) • Bimtek Pelestarian • Mendaftarkan kepemilikan naskah kuno kepada Pemerintah Daerah/ melalui meta data. • Regulasi penyerahan hasil alihmedia naskah kuno oleh Masyarakat.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG
URUSAN PENYELENGGARAAN

4.1. Uraian Program

Tindak lanjut terhadap arah kebijakan dan strategi Urusan Perpustakaan di implementasikan melalui program beserta indikator outcome/output, target, dan pendanaan. Program itu sendiri adalah kumpulan dari kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Program merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang ditetapkan.

Di dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya untuk Program Urusan Perpustakaan terdiri dari 3 (tiga) sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan program

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan administrasi, akuntabilitas keuangan, perencanaan dan operasional perkantoran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perpustakaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kantor baik sarana kerja maupun sarana penunjang pelayanan serta pemeliharaan inventaris kantor

Sasaran program

Tata kelola dan penatausahaan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan operasional perkantoran serta tersedianya sarana kerja dan sarana layanan yang memadai baik melalui pengadaan maupun pemeliharaan.

b. Program Pembinaan Perpustakaan

Tujuan program adalah meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan baik kelembagaan, sumber daya

manusia, bahan perpustakaan (koleksi, tatakelola data perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca.

Sasaran Program

1. Pengelolaan Perpustakaan berstandar SNP
2. Peningkatan Kompetensi SDM
3. Pengembangan Bahan Perpustakaan/KCKR/Terbitan
4. Terbangunnya Data Base Bidang Perpustakaan
5. Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca
6. Pemerataan Layanan Perpustakaan

c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Tujuan program adalah melestarikan warisan budaya nasional dengan menghimpun, melestarikan (preservasi) bahan perpustakaan dan menyajikannya kepada pemakai.

Sasaran program adalah koleksi daerah dan koleksi kuno yang memiliki nilai informasi.

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan juga mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024. Kegiatan adalah kumpulan sub kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran. Berikut uraian kegiatan bidang perpustakaan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yang bersifat wajib :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
- j. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

- k. Pelestarian karya cetak dan karya rekam daerah di daerah provinsi
- l. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
- m. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
- n. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditentukan Pemerintah Daerah Provinsi.

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.

Sub Kegiatan adalah bagian dari suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang ditetapkan. Terkait dengan pendanaan baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal, pengalokasiannya terus mengalami peningkatan. Setiap keluaran dari sub kegiatan harus ditetapkan target yang akan dicapai. Selain itu sub kegiatan yang dilaksanakan selain bersumber dari APBD, juga didukung oleh sumber dana dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan secara internal serta optimalisasi layanan perpustakaan kepada masyarakat.

Berikut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel serta Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang di dalam Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan. Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra .

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NISPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Terwujudnya Budaya Literasi Menuju Sumsel Cerdas	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
					2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Koleksi, SDM, Pelayanan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan		Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Tersedianya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
				Perpustakaan Yang Dibina untuk dikembangkan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	
				Tersedianya koleksi perpustakaan khas daerah provinsi		Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan	Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	

				Perpustakaan Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
				Tenaga Perpustakaan yang meningkat kompetensinya	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	
				Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Perpustakaan Deposit yang dikembangkan	Jumlah perpustakaan deposit yang dikembangkan	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit	
				Pengadaan Koleksi Konvensional dan Digital	Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
				Koleksi yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan masyarakat	Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
				Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus yang dibina oleh Provinsi	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	

				Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Sub Kegiatan Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Fase Pra Membaca, Saat Membaca dan Pasca Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	
				Penyelenggaraan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	
				Terbangunnya Pojok Baca di Tempat Tempat Umum	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
				Penghargaan yang diberikan kepada Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
				Perpustakaan Berbasis Inklusi Bantuan Perpustakaan Provinsi	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
				Duta Baca/Bunda Literasi yang didukung kegiatannya	Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	

				PKS dan MOU yang ditandatangani	Jumlah kerjasama peningkatan kegemaran membaca dan literasi	Sub Kegiatan Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	
				Pojok Baca Publik Berbasis Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Data Base yang terbangun	Jumlah data dan informasi perpustakaan	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
				Capaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi	Sub Kegiatan Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi	
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya Budaya Literasi Menuju Sumsel Cerdas	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno oleh masyarakat	Naskah Kuno yang dapat diakses oleh masyarakat	Meningkatnya Konservasi, Restorasi, Digitalisasi Naskah Kuno di Sumatera Selatan			
			Meningkatnya Pelestarian terhadap Naskah Kuno	Naskah kuno/Naskah langka yang keberadaanya di masyarakat/Pemerintah	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
				Tersedianya Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi yang Diestasikan	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	
				Tersedianya Karya Cetak Karya Rekam yang dihimpun	Jumlah koleksi KCKR yang dihimpun dan dikelola serta kepatuhan serah simpan KCKR	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	

				Penghargaan yang diberikan kepada para penerbit	Jumlah penerima Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
				Tersedianya Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	
				Terbitnya KID dan Literatur Sekunder	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Sub Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah	
				Terbitnya Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Sub Kegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah	
				Tersedianya Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi yang Dilestarikan	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	
				Naskah Kuno Milik Masyarakat yang dialihmediakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
				Naskah Kuno yang mendapatkan perawatan/pemeliharaan	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	

				Tersedianya Koleksi Budaya Etnis Nusantara Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikembangkan	Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
				Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
				Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang telah diseleksi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan Penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Budaya Literasi Menuju Sumsel Cerdas						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Akuntabilitas SAKIP	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Sumsel			
			Penguatan tata kelola perpustakaan yang baik	Terkelolanya administrasi dan operasional kantor sesuai ketentuan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tercapainya Kinerja yang Meningkat / Berkembang	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Data Statistik Sektoral Yang Terkumpul	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Dokumen Hasil Walidata Pendukung Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Dokumen Perencanaan Usulan Selain Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Diampu	Sub Kegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Diampu	

				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				ASN yang menerima gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Pelaporan dan AnaPro/Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana/Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut/Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Dokumen Pendataan dan PenA/Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Hasil Koordinasi Pelak/Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Pegawai Berdasarkan Tugas/Fung/Fungsi yang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Orang yang Mengikuti Sos/P/Perundang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Orang yang Mengikuti BimbTek/Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Instalasi/Listrik/ Penerangan	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Paket Peralatan dan Perlengkapan/Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Paket Barang Cetak dan Penggandaan/Penggandaan yang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan/Perundang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	
				Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis/SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Unit Aset Tetap Tak Terwujud/Terwujud	Jumlah Unit Aset Tetap Tak Terwujud yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Tak Terwujud	
				Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Unit Sarana dan Prasarana Gedung K/Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Unit Sarana dan Prasarana Pendukung/Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didirikan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Laporan Penyediaan Jasa Komunikas/Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Laporan Penyediaan Jasa Peralatan /Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan /Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Kendaraan Perorangan DinaKe/Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	
				Mebel yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Peralatan dan Mesin Lainnya/ yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Sarana Aset Tetap yang dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Buku Rusak yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Lainnya/Dipelihara/	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Gedung/Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	ProSN
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.23	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKA AN				21,515,608 ,798.00		28,166,200, 362.00		27,063,025 ,552.00		28,272,292 ,398.00		29,832,304 ,086.00		
23.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		100%	18,922,928 ,798.00	100%	23,013,113, 457.00	100%	23,801,869 ,163.00	100%	24,885,418 ,592.00	100%	26,237,443 ,309.00	Pengentasan Kemiskinan, Penanggula ngan Kemiskinan	Pendidik an yang Berkeadi lan
2.23.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		100%	100,000,00 0.00	100%	188,000,00 0.00	100%	213,000,00 0.00	100%	225,000,00 0.00	100%	236,000,00 0.00		
#NAME?	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000 .00	1 Dokumen	100,000,00 0.00	1 Dokumen	120,000,00 0.00	1 Dokumen	130,000,00 0.00	1 Dokumen	135,000,00 0.00		
2.23.01.1.0 1.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.0 0	1 Dokumen	5,000,000, 00	1 Dokumen	5,000,000, 00	1 Dokumen	5,500,000, 00		

2.23.01.1.0 1.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.0 0	1 Dokumen	5,000,000. 00	1 Dokumen	5,000,000. 00	1 Dokumen	5,500,000. 00		
2.23.01.1.0 1.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.0 0	1 Dokumen	5,000,000. 00	1 Dokumen	5,000,000. 00	1 Dokumen	5,500,000. 00		
2.23.01.1.0 1.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.0 0	1 Dokumen	5,000,000. 00	1 Dokumen	5,000,000. 00	1 Dokumen	5,500,000. 00		
2.23.01.1.0 1.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000 .00	1 Laporan	30,000,000. 00	1 Laporan	35,000,000 .00	1 Laporan	37,000,000 .00	1 Laporan	38,000,000 .00		

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
2.23.01.1.0 1.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.500.000,00		
2.23.01.1.0 1.008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	0,00	1 Data	2.000.000,00	1 Data	2.000.000,00	1 Data	2.000.000,00	1 Data	2.500.000,00		
2.23.01.1.0 1.009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0,00	1 Berita Acara	10.000.000,00	1 Berita Acara	10.000.000,00	1 Berita Acara	10.000.000,00	1 Berita Acara	10.000.000,00		

2.23.01.1.0 1.010	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	0.00	1 Dokumen	2,000,000.0 0	1 Dokumen	2,000,000. 00	1 Dokumen	2,000,000. 00	1 Dokumen	2,500,000. 00		
2.23.01.1.0 1.011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang Disusun	-	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.0 0	1 Dokumen	5,000,000. 00	1 Dokumen	5,000,000. 00	1 Dokumen	5,500,000. 00		
2.23.01.1.0 1.012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	-	0.00	1 Berita Acara	7,000,000.0 0	1 Berita Acara	7,000,000. 00	1 Berita Acara	7,000,000. 00	1 Berita Acara	7,500,000. 00		
2.23.01.1.0 1.013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang	Jumlah Substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan	-	-	0.00	1 Substansi	7,000,000.0 0	1 Substansi	7,000,000. 00	1 Substansi	7,000,000. 00	1 Substansi	7,500,000. 00		

	Diampu	Pemerintah Daerah yang Diampu													
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun		100%	15,511,540,000.00	100%	16,842,420,200.00	100%	17,154,000,000.00	100%	17,563,500,000.00	100%	18,471,000,000.00		
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	126 Orang	15,431,520,000.00	126 Orang	16,683,420,200.00	126 Orang	17,000,000,000.00	126 Orang	17,500,000,000.00	126 Orang	18,300,000,000.00		
2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	0.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	32,000,000.00	1 Dokumen	35,000,000.00		
2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	80,120,000.00	1 Dokumen	85,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen	95,000,000.00	1 Dokumen	97,000,000.00		

2.23.01.1.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,500,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00		
2.23.01.1.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,500,000.00	1 Laporan	6,000,000.00		
2.23.01.1.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	0.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,500,000.00	1 Dokumen	9,000,000.00		
2.23.01.1.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	-	-	0.00	1 Laporan	8,000,000.00	1 Laporan	8,000,000.00	1 Laporan	8,500,000.00	1 Laporan	9,000,000.00		

		Triwulan/ Semester/ SKPD													
2.23.01.1.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	0.00	1 Dokumen	8,000,000.0 0	1 Dokumen	8,000,000. 00	1 Dokumen	8,500,000. 00	1 Dokumen	9,000,000. 00		
2.23.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun		100%	15,000,000. 00	100%	37,000,000. 00	100%	38,000,000. 00	100%	40,500,000. 00	100%	44,000,000. 00		
2.23.01.1.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	2,000,000.0 0	1 Dokumen	2,000,000. 00	1 Dokumen	3,000,000. 00	1 Dokumen	3,500,000. 00		
2.23.01.1.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.0 0	1 Dokumen	5,000,000. 00	1 Dokumen	5,500,000. 00	1 Dokumen	6,000,000. 00		

2.23.01.1.0 3.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	0.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,500,000.00		
2.23.01.1.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,500,000.00		
2.23.01.1.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	18,000,000.00	1 Laporan	19,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	21,000,000.00		
2.23.01.1.0 3.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,500,000.00		
2.23.01.1.0 5	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang Disusun		100%	64,000,000.00	100%	236,000,000.00	100%	249,000,000.00	100%	254,000,000.00	100%	279,000,000.00		

2.23.01.1.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	0.00	Unit	5,000,000.00	Unit	5,000,000.00	Unit	5,000,000.00	Unit	5,000,000.00		
2.23.01.1.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0.00	1 Paket	120,000.00	1 Paket	120,000.00	1 Paket	120,000.00	1 Paket	120,000.00		
2.23.01.1.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0.00	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00		
2.23.01.1.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Paket	1 Dokumen	14,000,000.00	1 Dokumen	17,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00		
2.23.01.1.0 5.0005	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	0.00	2 Orang	2,000,000.00	2 Orang	2,000,000.00	2 Orang	2,000,000.00	2 Orang	2,000,000.00		
2.23.01.1.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	5 Orang	50,000,000.00	5 Orang	65,000,000.00	5 Orang	70,000,000.00	5 Orang	75,000,000.00	5 Orang	80,000,000.00		

2.23.01.1.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0.00	20 Orang	20,000,000.00	20 Orang	25,000,000.00	20 Orang	30,000,000.00	20 Orang	36,000,000.00		
2.23.01.1.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0.00	20 Orang	5,000,000.00	20 Orang	5,000,000.00	20 Orang	5,000,000.00	20 Orang	5,000,000.00		
2.23.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun		100%	614,000,000.00	100%	724,000,000.00	100%	754,000,000.00	100%	793,000,000.00	100%	816,000,000.00		
2.23.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	50,000,000.00	1 Paket	55,000,000.00	1 Paket	60,000,000.00	1 Paket	65,000,000.00	1 Paket	70,000,000.00		
2.23.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	0.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	25,000,000.00	1 Paket	30,000,000.00		
2.23.01.1.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	1 Paket	30,000,000.00	1 Paket	35,000,000.00	1 Paket	37,000,000.00	1 Paket	40,000,000.00	1 Paket	43,000,000.00		

		Disediakan													
2.23.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	180,000,00 0.00	1 Paket	200,000,00 0.00	1 Paket	220,000,00 0.00	1 Paket	230,000,00 0.00	1 Paket	235,000,00 0.00		
2.23.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30,000,000 .00	1 Paket	35,000,000 00	1 Paket	37,000,000 .00	1 Paket	40,000,000 .00	1 Paket	42,000,000 00		
2.23.01.1.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000 .00	1 Dokumen	25,000,000 00	1 Dokumen	26,000,000 .00	1 Dokumen	27,000,000 .00	1 Dokumen	28,000,000 00		
2.23.01.1.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	0.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	0.00		
2.23.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300,000,00 0.00	1 Laporan	350,000,00 0.00	1 Laporan	350,000,00 0.00	1 Laporan	360,000,00 0.00	1 Laporan	360,000,00 0.00		
2.23.01.1.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	2,000,000.0 0	1 Dokumen	2,000,000. 00	1 Dokumen	3,000,000 00	1 Dokumen	4,000,000. 00		

2.23.01.1.0-6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00		
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	100%		840,000.00	100%	2,801,893.257.00	100%	3,009,889.163.00	100%	3,472,416.592.00	100%	3,984,443.309.00		
2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit Motor dan 1 Unit Mobil	440,000.00	2 Unit	801,893.257.00	2 Unit	1,000,000.000.00	2 Unit	0.00	2 Unit	0.00		
2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	0.00	1 Unit	500,000.000.00	1 Unit	709,869.163.00	1 Unit	500,000.000.00	1 Unit	647,026.717.00		
2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	250,000.00	1 Paket	280,000.000.00	1 Paket	280,000.000.00	1 Paket	800,000.000.00	1 Paket	900,000.000.00		

2.23.01.1.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	0.00	5 Unit	50,000,000 00	5 Unit	50,000,000 00	5 Unit	60,000,000 00	5 Unit	65,000,000 00		
2.23.01.1.0 7.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	0.00	2 Unit	50,000,000 00	2 Unit	50,000,000 00	2 Unit	60,000,000 00	2 Unit	65,000,000 00		
2.23.01.1.0 7.0008	Pengadaan Aset Tetap Tak Terwujud	Jumlah Unit Aset Tetap Tak Terwujud yang Disediakan	Unit	-	0.00	2 Unit	20,000,000 00	2 Unit	20,000,000 00	2 Unit	30,000,000 00	2 Unit	35,000,000 00		
2.23.01.1.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	0.00	1 Unit	500,000,00 0.00	1 Unit	500,000,00 0.00	1 Unit	800,000,00 0.00	1 Unit	850,000,00 0.00		
2.23.01.1.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	12 Unit	150,000,00 0.00	1 Paket	200,000,00 0.00	1 Paket	200,000,00 0.00	1 Paket	722,416,59 2.00	1 Paket	872,416,59 2.00		
2.23.01.1.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	0.00	10 Unit	200,000,00 0.00	10 Unit	200,000,00 0.00	10 Unit	500,000,00 0.00	10 Unit	550,000,00 0.00		

2.23.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan		100%	968,200,00 0.00	100%	1,092,000,0 00.00	100%	1,092,000, 000.00	100%	1,115,000, 000.00	100%	1,115,000, 000.00		
2.23.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000 00	1 Laporan	12,000,000 00	1 Laporan	12,000,000 00	1 Laporan	15,000,000 00	1 Laporan	15,000,000 00		
2.23.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	480,000,00 0.00	1 Laporan	480,000,00 0.00	1 Laporan	480,000,00 0.00	1 Laporan	500,000,00 0.00	1 Laporan	500,000,00 0.00		
2.23.01.1.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	0.00	1 Laporan	100,000,00 0.00	1 Laporan	100,000,00 0.00	1 Laporan	100,000,00 0.00	1 Laporan	100,000,00 0.00		
2.23.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan	498,200,00 0.00	1 Laporan	500,000,00 0.00	1 Laporan	500,000,00 0.00	1 Laporan	500,000,00 0.00	1 Laporan	500,000,00 0.00		

2.23.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		100%	810,088,79 8.00	100%	1,292,000,0 00.00	100%	1,292,000, 000.00	100%	1,292,000, 000.00	100%	1,292,000, 000.00		
2.23.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	80,000,000 .00	2 Unit	85,000,000 .00	2 Unit	85,000,000 .00	2 Unit	85,000,000 .00	2 Unit	85,000,000 .00		
2.23.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	14 Unit	200,000.00 0.00	14 Unit	210,000.00 0.00	14 Unit	210,000.00 0.00	14 Unit	210,000.00 0.00	14 Unit	210,000.00 0.00		
2.23.01.1.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	0.00	5 Unit	30,000,000 00	5 Unit	30,000,000 00	5 Unit	30,000,000 00	5 Unit	30,000,000 00		
2.23.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	69 Unit	40,000,000 00	69 Unit	42,000,000 00	69 Unit	42,000,000 00	69 Unit	42,000,000 00	69 Unit	42,000,000 00		
2.23.01.1.0 9.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1 Unit	30,000,000 00	1 Unit	35,000,000 00	1 Unit	35,000,000 00	1 Unit	35,000,000 00	1 Unit	35,000,000 00		

2.23.01.1.0 9.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	0.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00		
2.23.01.1.0 9.0009	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	460,088,798.00	1 Unit	480,000,000.00	1 Unit	480,000,000.00	1 Unit	480,000,000.00	1 Unit	480,000,000.00		
2.23.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	0.00	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00		
2.23.01.1.0 9.0011	Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	0.00	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00		
23.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		69.00%	2,382,680,000.00	70.00%	2,897,695,476.00	71.00%	2,997,011,627.00	72.00%	3,130,928,169.00	73.00%	3,303,686,871.00	Pengentasan Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan	Pendidikan yang Berkeadilan
2.23.02.1.0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah		100%	910,000,000.00	100%	1,165,000,000.00	100%	1,264,316,151.00	100%	1,264,316,151.00	100%	1,321,316,151.00		

		Provinsi yang Dikelola													
2.23.02.1.0 1.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	-	0.00	100 Perpustakaan	30,000,000.00	100 Perpustakaan	35,000,000.00	100 Perpustakaan	35,000,000.00	100 Perpustakaan	40,000,000.00		
2.23.02.1.0 1.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan	Eksemplar	-	0.00	210 Eksemplar	15,000,000.00	220 Eksemplar	15,000,000.00	230 Eksemplar	15,000,000.00	240 Eksemplar	17,000,000.00		
2.23.02.1.0 1.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan	150 Perpustakaan	100,000,000.00	180 Perpustakaan	100,000,000.00	200 Perpustakaan	123,318,151.00	220 Perpustakaan	123,318,151.00	300 Perpustakaan	125,318,151.00		

2.23.02.1.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi	Orang	60 Orang	200.000,00 0.00	90 Orang	210.000,00 0.00	120 Orang	230.000,00 0.00	150 Orang	230.000,00 0.00	180 Orang	235.000,00 0.00		
2.23.02.1.0 1.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Perpustakaan	-	0.00	1 Perpustakaan	20.000.000. 00	1 Perpustakaan	25.000.000. 00	1 Perpustakaan	25.000.000. 00	1 Perpustakaan	30.000.000. 00		
2.23.02.1.0 1.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah perpustakaan deposit yang dikembangkan	Perpustakaan	-	0.00	1 Perpustakaan	5.000.000.0 0	1 Perpustakaan	7.000.000. 00	1 Perpustakaan	7.000.000. 00	1 Perpustakaan	8.000.000. 00		
2.23.02.1.0 1.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Buku umum: 1.875 eksemplar e-book: 1.677 eksemplar	1800 Eksemplar	260.000,00 0.00	1700 Eksemplar	270.000,00 0.00	1800 Eksemplar	280.000,00 0.00	2000 Eksemplar	285.000,00 0.00	2200 Eksemplar	300.000,00 0.00		

2.23.02.1.0 1.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan masyarakat	-	-	0.00	100 Judul	25,000,000.00	100 Judul	30,000,000.00	100 Judul	30,000,000.00	100 Judul	30,000,000.00		
2.23.02.1.0 1.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi	69.62	-	0.00	70.81	60,000,000.00	71	60,000,000.00	71.50	60,000,000.00	72	60,000,000.00		
2.23.02.1.0 1.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	72.24	-	0.00	73.30	60,000,000.00	73.91	60,000,000.00	74.26	60,000,000.00	74.92	60,000,000.00		
2.23.02.1.0 1.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Jumlah kerjasama peningkatan kegemaran membaca dan literasi	MoU	36 MoU	20,000,000.00	42 MoU	25,000,000.00	50 MoU	27,000,000.00	58 MoU	27,000,000.00	65 MoU	30,000,000.00		
2.23.02.1.0 1.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1 Perpustakaan	260,000,000.00	1 Perpustakaan	260,000,000.00	1 Perpustakaan	260,000,000.00	1 Perpustakaan	260,000,000.00	1 Perpustakaan	265,000,000.00		
2.23.02.1.0 1.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	3	3	80,000,000.00	3	85,000,000.00	3	87,000,000.00	3	87,000,000.00	3	90,000,000.00		

2.23.02.1.0 1.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	-	-	0.00	100 Perpustakaan	20,000,000 00	120 Perpustakaan	25,000,000 00	150 Perpustakaan	25,000,000 00	170 Perpustakaan	30,000,000 00		
2.23.02.1.0 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		100%	1,472,680, 000.00	100%	1,732,895,4 76.00	100%	1,732,895, 476.00	100%	1,886,612, 018.00	100%	1,982,370, 720.00		
2.23.02.1.0 2.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus	-	1 Lokus	747,500.00 0.00	1 Lokus	765,000.00 0.00	1 Lokus	765,000.00 0.00	1 Lokus	765,000.00 0.00	1 Lokus	767,370,72 0.00		
2.23.02.1.0 2.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat- tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi	15 Pojok Baca	17 Pojok Baca	725,180.00 0.00	20 Pojok Baca	767,695,47 6.00	22 Pojok Baca	767,695,47 6.00	25 Pojok Baca	901,612,01 6.00	30 Pojok Baca	1,000,000, 000.00		

2.23.02.1.0 2.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	-	-	0.00	17 Orang	50,000,000.00	17 Orang	50,000,000.00	17 Orang	50,000,000.00	17 Orang	55,000,000.00		
2.23.02.1.0 2.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	Perpustakaan	-	0.00	10 Perpustakaan	50,000,000.00	10 Perpustakaan	50,000,000.00	10 Perpustakaan	50,000,000.00	10 Perpustakaan	60,000,000.00		
2.23.02.1.0 2.0006	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	-	-	0.00	20	100,000,000.00	25	100,000,000.00	30	100,000,000.00	40	100,000,000.00		
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki		9%	210,000,000.00	12%	255,391,429.00	13%	264,144,762.00	14%	275,947,637.00	15%	291,173,906.00	Pengentasan Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan	Pendidikan yang Berkeadilan
2.23.03.1.0 1	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi yang dilestarikan		100%	35,000,000.00	100%	50,391,429.00	100%	53,000,000.00	100%	58,000,000.00	100%	61,000,000.00		

2.23.03.1.0 1.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah koleksi KCKR yang dihimpun dan dikelola serta kepatuhan serah simpan KCKR	344 Eksemplar	200 Eksemplar	35,000,000.00	210 Eksemplar	40,391,429.00	220 Eksemplar	41,000,000.00	230 Eksemplar	43,000,000.00	230 Eksemplar	44,500,000.00		
2.23.03.1.0 1.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah penerima Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	-	0.00	12 Penerbit	10,000,000.00	14 Penerbit	12,000,000.00	16 Penerbit	15,000,000.00	18 Penerbit	16,500,000.00		
2.23.03.1.0 2	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang Diterbitkan		100%	40,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	54,000,000.00	100%	54,000,000.00	100%	57,000,000.00		
2.23.03.1.0 2.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	300 Entry	20,000,000.00	310 Entry	25,000,000.00	320 Entry	27,000,000.00	330 Entry	27,000,000.00	340 Entry	28,500,000.00		
2.23.03.1.0 2.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Eksemplar	300 Eksemplar	20,000,000.00	310 Eksemplar	25,000,000.00	320 Eksemplar	27,000,000.00	330 Eksemplar	27,000,000.00	340 Eksemplar	28,500,000.00		

2.23.03.1.0 3	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi yang Dilestarikan		100%	135,000,00 0.00	100%	145,000,00 0.00	100%	146,000,00 0.00	100%	151,000,00 0.00	100%	157,000,00 0.00		
2.23.01.1.0 3.0003	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	31 Lembar	30 Lembar	75,000,000 .00	30 Lembar	80,000,000 .00	30 Lembar	80,000,000 .00	30 Lembar	83,000,000 .00	30 Lembar	86,000,000 .00		
2.23.01.1.0 3.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	50 Orang	60,000,000 .00	50 Orang	65,000,000 .00	50 Orang	65,000,000 .00	50 Orang	68,000,000 .00	50 Orang	71,000,000 .00		
2.23.03.1.0 4	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikembangkan		100%	0.00	100%	10,000,000 .00	100%	12,144,762 .00	100%	12,947,637 .00	100%	16,173,906 .00		

2.23.03.1.0 4.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksempla r	-	0.00	210 Eksemplar	5,000,000.0 0	220 Eksempl ar	6,000,000. 00	230 Eksempl ar	6,000,000. 00	240 Eksempl ar	7,500,000. 00		
2.23.03.1.0 4.0002	Pengolahan dan Penyangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan Penyangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksempla r	-	0.00	210 Eksemplar	5,000,000.0 0	220 Eksempl ar	6,144,762. 00	230 Eksempl ar	6,947,637. 00	240 Eksempl ar	8,673,906. 00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Program Prioritas adalah program program yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Terdapat 12 Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sumsel, dimana Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel mendukung Program Prioritas Pendidikan Yang Berkeadilan dengan melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan. Adapun sub kegiatan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel yang mendukung program prioritas tergambar pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di seluruh wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat. Sub Kegiatan	

			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Kegiatan : Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Kegiatan : Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dimukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029 pada Indikator Kinerja Utama terdiri dari

Tujuan Perangkat Daerah : Terwujudnya Budaya Literasi Menuju Sumsel Cerdas dengan (1) Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan (2) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca yang ditargetkan terus meningkat sampai dengan Tahun 2029 dengan Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Sementara untuk Indikator Sasaran di dalam Rencana Strategis terdapat sasaran tambahan (1) Meningkatnya kemanfaatan naskah

kuno dengan indikator persentase pengunjung yang memanfaatkan naskah kuno (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dengan indikator nilai SAKIP hasil evaluasi inspektorat. Untuk tahun 2030 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di targetkan ditargetkan mencapai 75,00 dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca di targetkan 75.00 Berikut tegambar pada tabel 4.4 berikut

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	
2	Nilai Tingkat Kegamaran Membaca Masyarakat	Nilai	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	

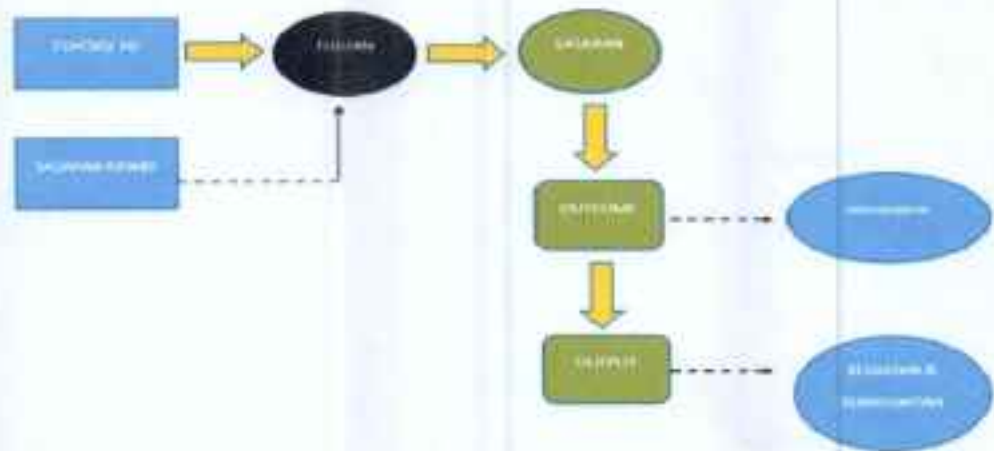
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran dari suatu program, kegiatan. Untuk target Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Tahun 2025-2029 terus mengalami peningkatan. Terdapat 2 Indikator Kunci untuk Urusan Perpustakaan yaitu (1) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca di Tahun 2025 dengan target 70,00, Tahun 2026 target sebesar 71,00, Tahun 2027 dengan target sebesar 72,00, Tahun 2028 target sebesar 73,00 dan Tahun 2029 ditetapkan sebesar 74,00 serta Tahun 2030 dengan target 75.00. (2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Tahun 2025 dengan target 73,00 sd Tahun 2030 mencapai 75.00. Selanjutnya terdapat sasaran tambahan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Persentase pengunjung yang memanfaatkan naskah kuno serta Nilai SAKIP hasil evaluasi inspektorat. Untuk 2 (dua) indikator tambahan dimaksud tertuang di dalam Tabel 4.5, di bawah ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase pengunjung yang memanfaatkan naskah kuno	%	7	9	12	13	14	15	
2	Nilai SAKIP hasil evaluasi inspektorat	Nilai	80,29	82,00	84,00	85,00	87,00	88,00	

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun selama lima tahun yang berisi penjabaran tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta memuat masalah, isu strategis dan langkah langkah strategis yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Di dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam kaidah pelaksanaannya selama lima Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan pengarusutamaan gender dimana keterlibatan perempuan dan laki laki memiliki kontribusi yang sama di dalam pembangunan daerah, sementara itu pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi diharapkan dapat berdampak kepada masyarakat salah satunya dengan keberadaan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan menjadi pusat berkegiatan masyarakat yang bertujuan untuk penguatan literasi melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan buku buku ilmu terapan teknologi tepat guna. Pembangunan di bidang sumberdaya manusia melalui perpustakaan adalah pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan waktu untuk menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat mulai dari anak anak s.d usia lanjut. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) dimana melalui transformasi digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, kondisi ini tentu saja membutuhkan sarana prasarana berbasis digital yang tersebar di area area publik melalui pendirian pojok baca/perpustakaan digital. Di samping itu dengan telah berjalannya rencana strategis tahun 2020-2025, Perangkat Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan di

bidang urusan perpustakaan yang dilakukan setiap tahunnya, namun capaian keberhasilan masih belum mampu mendongkakan target target capaian urusan perpustakaan secara nasional

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini, apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan Rencana Strategis maka akan disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan isu-isu strategis terkait dengan kebijakan kelembagaan. Demikian rencana strategi ini dibuat dan disusun sebagai acuan di dalam menentukan strategi, arah kebijakan dan alat ukur pencapaian program dan kegiatan dari target yang ditetapkan serta diperlukan masukan terhadap kesempurnaan dari Rencana Strategis.